BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa penataan dan perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu instrumen penting yang merupakan kesatuan wadah meliputi, ruang darat, ruang laut dan ruang udara sebagai sumber daya yang perlu ditingkatkan secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum yang berkeadilan serta terjadinya perubahan bentang alam yang mengakibatkan kerusakan fisik dan sosial dari bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 telah merubah struktur ruang wilayah sehingga perlu dilakukan penyelarasan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang;

b. bahwa pemahaman masyarakat yang semakin maju dan berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif sangat diharapkan agar terwujud ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan kehidupan dan penghidupan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 17 angka 7 dan angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Tahun 2024-2044;

Menimbang :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199); dan
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara 2014 Nomor 206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

15. Wilayah Perencanaan adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
16. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
17. Gampong adalah kesatuan Masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari wilayah perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau sprasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Lingkungan Desa adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman desa/gampong.
23. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
24. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
26. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
27. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
28. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

29. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
31. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
32. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
33. Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
34. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
35. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1.000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
38. Jaringan Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
39. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
40. Telepon Fixed Line adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa atau kabel bawah laut telekomunikasi.
41. Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
42. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

43. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
44. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
45. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
46. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
47. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa atau kabel bawah laut air minum.
48. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
49. Hidran Kebakaran adalah Alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
50. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
51. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
52. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
53. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
54. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
55. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
56. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
57. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
58. Jaringan Drainase Lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.

59. Bangunan Peresapan adalah sarana drainase yang berbentuk kolam retensi berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
60. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul penduduk atau masyarakat yang sedang berada di wilayah tersebut.
61. Jalur Sepeda adalah jalur khusus yang diperuntukan untuk lalu lintas pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin terpisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.
62. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
63. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
64. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
65. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
66. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
67. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
68. Zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang, jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
69. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
70. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
71. Sub-zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
72. Sub-zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

73. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
74. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu linyas dan bahu jalan.
75. Sub-zona Perkebunan Rakyat (PR) adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
76. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa kawasan lahan basah untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
77. Sub-zona Perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
78. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kabupaten yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
79. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
80. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
81. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
82. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kota.
83. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kecamatan.
84. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kelurahan.
85. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.

86. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
87. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
88. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
89. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
90. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja atau berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
91. Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah peruntukan ruang di daratan dengan batasbatas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
92. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
93. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
94. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
95. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
96. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

97. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.
98. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisien daerah hijau baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
99. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
100. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
101. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
102. Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
103. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
104. Koefisien Tapak Basement (KTB) adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTR, RDTR, dan PZ serta mempertimbangkan KDH minimum.
105. Luas kaveling minimum adalah luas kavling minimum pada zona perumahan yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten dengan kantor pertanahan.
106. Ketinggian Bangunan Maksimum (TB) Maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
107. Garis Sempadan Bangunan Minimum (GSB) Minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.

108. Jarak Bebas Samping Minimum (JBS) Minimum adalah jarak bebas samping minimum antara batas peta samping terhadap dinding bangunan terdekat.
109. Jarak Bebas Belakang Minimum (JBB) Minimum adalah jarak bebas belakang minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
110. Utilitas Perkotaan adalah kelengkapan meliputi ketersediaan dan akses warga kota terhadap energi kelistrikan, energi baru dan terbarukan, air baku dan air bersih, air limbah, persampahan, limbah B3, dan drainase air kotor.
111. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan meliputi kemudahan akses pemadan kebakaran, ketersediaan sarana persampahan dan pembuangan limbah, serta penyediaan lahan parkir.
112. Ruang Terbuka Non Hijau adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
113. Saluran Irigasi Teknis adalah pengairan yang airnya bisa diatur dan diukur.
114. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
115. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
116. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ atau danau atau embung atau waduk, mata air, dan pipa atau kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
117. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati ini.
118. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
119. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
120. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
121. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
122. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

123. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:
a. Tujuan penataan wilayah perencanaan;
b. Rencana struktur ruang;
c. Rencana pola ruang;
d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
e. Peraturan zonasi;
f. Kelembagaan.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

Tujuan penataan ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan Cot Girek sebagai pusat kegiatan pertanian dan perkebunan yang mandiri, handal, ramah, dan nyaman.

BAB IV
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya ditetapkan sebagai Wilayah Perencanaan I.

(2) Wilayah Perencanaan I Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah 6.397,53 (enam ribu tiga ratus sembilan tujuh koma lima tiga) hektare, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi dan terletak diantara $5.00.13^{00}$ sampai $4.57.13^{00}$ lintang utara dan $97.19.49^{00}$ – $97.26.43^{00}$ bujur timur.

(3) Batas Wilayah Perencanaan I Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Tualang Tuha dan Gampong Arongan Lt, Kecamatan Lhoksukon;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Rumoh Rayeuk dan Gampong Seureuke Kecamatan Langkahan;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Cot Girek dan Gampong Kampung Tempel, Kecamatan Cot Girek; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Beurandang Asan dan Gampong Trieng Kecamatan Cot Girek.

(4) Wilayah Perencanaan I Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi meliputi:
   a. Kecamatan Cot Girek terdiri dari Gampong Alue Drien, sebagian Gampong Alue Leuhob, Gampong Alue Seumambu, Gampong Batu XII, Gampong Cempeudak,

sebagian Gampong Cot Girek, Gampong Kp. Bantan, sebagian Gampong Kp. Tempel, Gampong Lhok Meurbo, Gampong Matang Teungoh, Gampong Pucok Alue, Gampong Seuneubok Baro, Gampong U Baro., dan Gampong Ulee Gampong; dan

b. Kecamatan Lhoksukon terdiri dari Gampong Alue Eumpok, sebagian Gampong Buket Hagu, Gampong Buloh Lt, Gampong Cot Asan, Gampong Geulumpang, Gampong Kumbang Lt, Gampong Lhok Kareung, Gampong Meunasah Dayah Lt, Gampong Meunasah Teungoh Lt, dan sebagian Gampong Teupin Keubeu.

(5) Wilayah Perencanaan I Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi meliputi:

a. Gampong Alue Drien dengan luas 111,01 (seratus sebelas koma nol satu) hektare;
b. Gampong Alue Leuhob dengan luas 1.081,40 (seribu delapan puluh satu koma empat nol) hektare;
c. Gampong Alue Seumambu dengan luas 151,79 (seratus lima puluh satu koma tujuh sembilan) hektare;
d. Gampong Batu XII dengan luas 154,01 (seratus lima puluh empat koma nol satu) hektare;
e. Gampong Cempeudak dengan luas 82,44 (delapan puluh dua koma empat empat) hektare;
f. Sebagian Gampong Cot Girek dengan luas 80,68 (delapan puluh koma enam delapan) hektare;
g. Gampong Kp. Bantan dengan luas 389,35 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga lima) hektare;
h. Gampong Kp. Tempel dengan luas 122,80 (seratus dua puluh dua koma delapan nol) hektare;
i. Gampong Lhok Meurbo dengan luas 705,64 (tujuh ratus lima koma enam empat) hektare;
j. Gampong Matang Teungoh dengan luas 130,50 (seratus tiga puluh koma lima nol) hektare;
k. Gampong Pucok Alue dengan luas 214,82 (dua ratus empat belas koma delapan dua) hektare;
l. Gampong Seuneubok Baro dengan luas 69,75 (enam puluh sembilan koma tujuh lima) hektare;
m. Gampong U Baro. dengan luas 72,87 (tujuh puluh dua koma delapan tujuh) hektare;
n. Gampong Ulee Gampong dengan luas 73,33 (tujuh puluh tiga koma tiga tiga) hektare. Gampong Alue Eumpok dengan luas 96,45 (sembilan puluh enam koma empat lima) hektare;
o. Gampong Buket Hagu dengan luas 1.618,32 (seribu enam ratus delapan belas koma tiga dua) hektare;
p. Gampong Buloh Lt dengan luas 95,50 (sembilan puluh lima koma lima nol) hektare;
q. Gampong Cot Asan dengan luas 167,85 (seratus enam puluh tujuh koma delapan lima) hektare;
r. Gampong Geulumpang dengan luas 98,85 (sembilan puluh delapan koma delapan lima) hektare;
s. Gampong Kumbang Lt dengan luas 139,22 (seratus tiga puluh sembilan koma dua dua) hektare;
t. Gampong Lhok Kareung dengan luas 374,80 (tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan nol) hektare;

u. Gampong Meunasah Dayah Lt dengan luas 118,23 (seratus delapan belas koma dua tiga) hektare;
v. Gampong Meunasah Teungoh Lt dengan luas 125,18 (seratus dua puluh lima koma satu delapan) hektare; dan
w. Gampong Teupin Keubeu dengan luas 122,73 (seraus dua puluh dua koma tujuh tiga) hektare.

(6) Wilayah Perencanaan I Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi 6 (Enam) SWP, meliputi:

a. SWP I.A dengan luas 1.091,66 (seribu sembilan puluh satu koma enam enam) hektare terbagi ke dalam 5 (lima) Blok, meliputi:
   1. Blok I.A.1 dengan luas 295,74 (dua ratus sembilan puluh lima koma tujuh empat hektare meliputi sebagian Gampong Kumbang Lt, Sebagian Gampong Meunasah Dayah Lt, dan sebagian Gampong Meunasah Teungoh Lt;
   2. Blok I.A.2 dengan luas 247,56 (dua ratus empat puluh tujuh koma lima enam) hektare meliputi sebagian Gampong Alue Drien, sebagian Gampong Buloh Lt, Gampong Geulumpang, sebagian Gampong Matang Teungoh dan sebagian Gampong Seuneubok Baro;
   3. Blok I.A.3 dengan luas 129,59 (seratus dua puluh sembilan koma lima sembilan) hektare meliputi sebagian Gampong Cempeudak dan Gampong U Baro;
   4. Blok I.A.4 dengan luas 215,29 (dua ratus lima belas koma dua sembilan) hektare meliputi sebagian Gampong Alue Seumambu, Gampong Batu XII, dan sebagian Gampong Ulee Gampong; dan
   5. Blok I.A.5 dengan luas 203,48 (dua ratus koma empat delapan) hektare meliputi sebagian Gampong Cot Girek dan Gampong Kp Tempel.

b. SWP I.B dengan luas 954,62 (sembilan ratus lima puluh empat koma enam dua) hektare terbagi ke dalam 4 (empat) Blok, meliputi:
   1. Blok I.B.1 dengan luas 183,34 (seratus delapan puluh tiga koma tiga empat) hektare meliputi Gampong Alue Eumpok, sebagian Gampong Kumbang Lt, sebagian Gampong Meunasah Dayah Lt., dan sebagian Gampong Meunasah Teungoh Lt.;
   2. Blok I.B.2 dengan luas 250,68 (dua ratus lima puluh koma enam delapan) hektare meliputi sebagian Gampong Alue Drien, sebagian Gampong Buloh Lt, dan sebagian Gampong Lhok Kareung;
   3. Blok I.B.3 dengan luas 294,83 (dua ratus sembilan puluh empat koma delapan tiga) hektare meliputi sebagian Gampong Ceumpeudak, sebagian Gampong Cot Asan, sebagian Gampong Matang Teungoh, sebagian Gampong Pucok Alue, dan sebagian Gampong Seuneubok Baro; dan
   4. Blok I.B.4 dengan luas 225,78 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh delapan) hektare meliputi sebagian Gampong Alue Seumambu, sebagian Gampong Kp Bantan, dan sebagian Gampong Ulee Gampong.

c. SWP I.C dengan luas 928,99 (sembilan dua puluh delapan koma sembilan sembilan) hektare terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok, meliputi:

1. Blok I.C.1 dengan luas 335,60 (tiga ratus tiga puluh lima koma enam nol) hektare meliputi sebagian Gampong Cot Asan dan sebagian Gampong Lhok Kareung;
2. Blok I.C.2 dengan luas 261,89 (dua ratus enam puluh satu koma delapan sembilan) hektare meliputi sebagian Gampong Kp. Bantan, dan sebagian Gampong Pucok Alue; dan
3. Blok I.C.3 dengan luas 331,50 (tiga ratus tiga puluh satu koma lima nol) hektare meliputi sebagian Gampong Buket Hagu dan Gampong Teupin Keubeu.

d. SWP I.D dengan luas 1.343,43 (seribu tiga ratus empat puluh tiga koma empat tiga) hektare terbagi ke dalam 4 (empat) Blok, meliputi:
1. Blok I.D.1 dengan luas 582,72 (lima ratus delapan puluh dua koma tujuh dua) hektare meliputi sebagian Gampong Kp. Bantan dan sebagian Gampong Lhok Meurbo;
2. Blok I.D.2 dengan luas 326,98 (tiga ratus dua puluh enam koma sembilan delapan) hektare meliputi sebagian Gampong Lhok Meurbo;
3. Blok I.D.3 dengan luas 195,52 (seratus sembilan puluh lima koma lima dua) hektare meliputi sebagian Gampong Buket Hagu; dan
4. Blok I.D.4 dengan luas 238,21 (dua ratus tiga puluh delapan koma dua satu) hektare meliputi sebagian Gampong Alue Leuhob.

e. SWP I.E dengan luas 1.214,03 (seribu dua ratus empat belas koma nol tiga) terbagi ke dalam 6 (enam) Blok, meliputi:
1. Blok I.E.1 dengan luas 184,18 (seratus delapan puluh empat koma satu delapan) hektare meliputi sebagian Gampong Buket Hagu;
2. Blok I.E.2 dengan luas 203,97 (dua ratus tiga koma sembilan tujuh) hektare meliputi sebagian Gampong Buket Hagu;
3. Blok I.E.3 dengan luas 225,19 (duaa ratus dua puluh lima koma satu sembilan) hektare meliputi sebagian Gampong Buket Hagu;
4. Blok I.E.4 dengan luas 173,16 (seratus tujuh puluh tiga koma satu enam) hektare meliputi sebagian Gampong Buket Hagu;
5. Blok I.E.5 dengan luas 191,20 (seratus sembilan puluh satu koma dua nol) hektare meliputi sebagian Gampong Buket Hagu; dan
6. Blok I.E.6 dengan luas 236,33 (dua ratus tiga puluh enam koma tida tiga) hektare meliputi Gampong Buket Hagu.

f. SWP I.F dengan luas 864,78 (delapan ratus enam puluh empat koma tujuh delapan) hektare terbagi ke dalam 4 (empat) Blok, yaitu:
1. Blok I.F.1 dengan luas 219,58 (dua ratus sembilan belas koma lima delapan) hektare meliputi sebagian Gampong Alue Leuhob dan sebagian Gampong Lhok Meurbo;
2. Blok I.F.2 dengan luas 305,58 (tiga ratus lima koma lima delapan) hektare meliputi sebagian Gampong Alue Leuhob;

3. Blok I.F.3 dengan luas 141,56 (seratus empat puluh satu koma lima enam) hektare meliputi sebagian Gampong Alue Leuhob; dan
4. Blok I.F.4 dengan luas 198,06 (seratus sembilan puluh delapan koma nol enam) hektare meliputi sebagian Gampong Alue Leuhob.

g. Delineasi Wilayah Perencanaan I Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
a. Rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. Rencana jaringan transportasi;
c. Rencana jaringan energi;
d. Rencana jaringan telekomunikasi;
e. Rencana jaringan sumber daya air;
f. Rencana jaringan air minum;
g. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
h. Rencana jaringan persampahan;
i. Rencana jaringan drainase; dan
j. Rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Ketentuan mengenai rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK);
b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK); dan
c. Pusat Lingkungan Desa.

(2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada PPK Batu XII di SWP I.A Blok I.A.4.

(3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. SPPK U Baro. di SWP I.A Blok I.A.3;
b. SPPK Cot Girek di SWP I.A Blok I.A.5;

c. SPPK Lhok Kareung di SWP I.B Blok I.B.2;
d. SPPK Buket Hagu di SWP I.E Blok I.E.3; dan
e. SPPK Alue Leuhob di SWP I.F Blok I.F.2.

(4) Pusat Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. PPL Alue Drien di SWP I.A Blok I.A.2;
b. PPL Alue Eumpok di SWP I.B Blok I.B.1;
c. PPL Cempeudak di SWP I.A Blok I.A.3;
d. PPL Cot Asan di SWP I.C Blok I.C.1;
e. PPL Geulumpang di SWP I.A Blok I.A.2;
f. PPL Kp. Bantan di SWP I.B Blok I.B.4;
g. PPL Kp. Tempel di SWP I.A Blok I.A.5;
h. PPL Lhok Meurbo di SWP I.D Blok I.D.1;
i. PPL Meunasah Dayah Lt. di SWP I.A Blok I.A.1;
j. PPL Meunasah Teungoh Lt. di SWP I.A Blok I.A.1;
k. PPL Pucok Alue di SWP I.B Blok I.B.3; dan
l. PPL Ulee Gampong di SWP I.A Blok I.A.4.

(5) Ketentuan mengenai rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
a. Jalan kolektor primer;
b. Jalan kolektor sekunder
c. Jalan lokal primer;
d. Jalan lokal sekunder;
e. Jalan lingkungan primer;
f. Jalan lingkungan sekunder;
g. Jalan khusus;
h. Jalan tol;
i. Terminal barang; dan
j. Jembatan.

(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Ruas jalan Alu Luhop – Buket Hagu, melalui:
1. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
2. SWP I.F Blok I.F.4.
b. Ruas jalan Alue le Puteh – Trans Unit V melalui SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
c. Ruas jalan Jl. Lhoksukon – Cot Girek melalui SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
d. Ruas jalan KM. XII – Alue Leuhob, melalui:
1. SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
2. SWP I.B Blok I.B.4;
3. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4;
4. SWP I.E Blok I.E.6; dan
5. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

e. Ruas jalan Langkahan – PIR Trans Alue Leuhob melalui SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4.

(3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ruas jalan Alue Leuhop – Buket Hagu, melalui:
1. SWP I.C Blok I.C.3;
2. SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; dan
3. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.6.

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Ruas jalan Alue Seumambu – Cot Girek/Serba Jadi, melalui SWP I.A Blok I.A.5;
b. Ruas jalan KM. IV – Cot Hasan melalui;
   1. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
   2. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
c. Ruas jalan KM. VII – Buket Mee, melalui:
   1. SWP I.A Blok I.A.1; dan
   2. SWP I.B Blok I.B.1.
d. Ruas jalan Simpang Alue Seumambu – Matang Teungoh melalui SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
e. Ruas jalan U Baro – Alue Drien, melalui:
   1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
   2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
f. Ruas jalan U Baro – Matang Teungoh Cot Girek, melalui;
   1. SWP I.A Blok I.A.3; dan
   2. SWP I.B Blok I.B.3.
g. Ruas jalan lokal primer lainnya melalui
   1. SWP I.B Blok I.B.1; dan
   2. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.

(5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Ruas jalan Alue Drien – Meunasah Buloh, melalui:
   1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
   2. SWP I.B Blok I.B.2.
b. Ruas jalan Batu XII – Kampung Tempel, melalui SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5
c. Ruas jalan Batu XII – Pondok Titi, melalui SWP I.A Blok I.A.5
d. Ruas jalan Batu XII – Ulee Gampong, melalui SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5
e. Ruas jalan Kampung Bantan – Pucok Alue, melalui:
   1. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
   2. SWP I.C Blok I.C.2; dan
   3. SWP I.D Blok I.D.1.
f. Ruas jalan Kampung Lalang – Kampung Bantan, melalui:
   1. SWP I.C Blok I.C.2; dan
   2. SWP I.D Blok I.D.1.
g. Ruas jalan Lhok Reuhat – Km. VIII, melalui SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
h. Ruas jalan Pinto Rimba – Pucok Alue, melalui:
   1. SWP I.B Blok I.B.3;
   2. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
   3. SWP I.D Blok I.D.1.
i. Ruas jalan Rimba Karya – Alue Leuhop melalui SWP I.F Blok I.F.1;
j. Ruas jalan Simpang Buket Yamaha – Kampung Lalang melalui SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;

k. Ruas jalan Simpang Buloh – Krueng Peutou melalui SWP I.A Blok I.A.4;
l. Ruas jalan Simpang Cempeudak – Ulee Gampong melalui:
   1. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
   2. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
m. Ruas jalan Simpang Jalan Puskemas XII – Jalan Buloh melalui SWP I.A Blok I.A.4;
n. Ruas jalan lokal sekunder lainnya, melalui:
   1. SWP I.A Blok I.A.3;
   2. SWP I.B Blok I.B.3;
   3. SWP I.E Blok I.E.2; dan
   4. SWP I.F Blok I.F.4.

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Ruas jalan Bintang Hu Trans – Buket Hagu Trans, melalui SWP I.E Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
b. Ruas jalan Buket Selamat – U Baro melalaui SWP I.A Blok Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
c. Ruas jalan Teupin Keubeu – Lhok Kareung, melalui SWP I.C Blok I.C.1;
d. Ruas jalan lingkungan primer lain yang melalui:
   1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
   2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
   3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
   4. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4;
   5. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
   6. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3 dan Blok I.F.4.

(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa jalan lingkungan sekunder lain, melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4;
e. SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.5 dan Blok I.E.6; dan
f. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

(8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu jalan line pipa (Matang Peusangan – Krueng Jambo Aye) yang melalui SWP I.A Blok I.A.5;

(9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu jalan tol Langsa - Lhokseumawe yang melalui SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok E.5.

(10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di SWP I.A Blok I.A.5.

(11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3;
d. SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.6; dan
e. SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4.

(12) Ketentuan mengenai rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),ayat (7),ayat (8), ayat (9), ayat (10),dan ayat (11) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
c. Gardu Distribusi.

(2) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4;
e. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
f. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

(3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4;
e. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
f. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

(4) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C Blok I.C.1;
d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.4;
e. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5; dan
f. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2 dan Blok I.F.4.

(5) Ketentuan mengenai rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Jaringan tetap; dan
b. Jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Jaringan serat optic
b. Sentral Telepon Otomat (STO); dan
c. Telepon *fixed line.*

(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4;
e. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
f. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

(4) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di SWP I.A berada di Blok I.A.5.

(5) Telepon fixed line sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.

(6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara Base Transceiver Station (BTS) berada di:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
c. SWP I.E Blok I.E.3; dan
d. SWP I.F Blok I.F.2.

(7) Ketentuan mengenai rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
a. Sistem jaringan irigasi;
b. Sistem pengendalian banjir; dan
c. Bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Jaringan irigasi sekunder; dan
b. Jaringan irigasi tersier.

(3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
c. SWP I.C Blok I.C.1.

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir, berada di SWP I.A Blok I.A.5.

(6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Pintu air; dan
b. Prasarana irigasi.

(7) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
b. SWP I.B Blok I.B.1.

(8) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, melalui SWP I.D Blok I.D.1.

(9) Ketentuan mengenai rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
a. Unit produksi;
b. Unit distribusi; dan
c. Unit pelayanan.

(2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air minum, melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi, melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;

d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4;
e. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
f. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

(4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa hidran kebakaran, berada di:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D Blok I.D.1;
e. SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
f. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

(5) Ketentuan mengenai rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
a. Sistem pengelolaan air limbah non domestik;
b. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
c. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berada di SWP I.F Blok F Blok I.F.1.

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja berada di SWP I.C Blok I.C Blok I.C.3.

(4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa subsistem pengolahan terpusat yakni IPAL skala kawasan tertentu/permukiman berada di:
a. SWP I.A Blok I.A.5; dan
b. SWP I.F Blok I.F.2.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
   a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
   c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
(2) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
   a. SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
   b. SWP I.B Blok I.B.4.
(3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
   a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
   b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
   c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
   d. SWP I.D Blok I.D.1;
   e. SWP I.E Blok I.E.3; dan
   f. SWP I.F Blok I.F.2.
(4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP I.C Blok I.C.3.
(5) Ketentuan mengenai rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
   a. Jaringan drainase primer;
   b. Jaringan drainase sekunder;
   c. Jaringan drainase tersier;
   d. Jaringan drainase lokal; dan
   e. Bangunan peresapan (kolam retensi).
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
   a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
   b. SWP I.B Blok I.B.4;
   c. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
   d. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
   a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
   b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
   c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;

d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4;
e. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
f. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4;
e. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
f. SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

(5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D Blok I.D.3; dan
e. SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4 dan Blok I.E.6.

(6) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B Blok I.B.3;
c. SWP I.C Blok I.C.1;
d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
e. SWP I.E Blok I.E.2.

(7) Ketentuan mengenai rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
a. Jalur evakuasi bencana;
b. Tempat evakuasi;
c. Jalur sepeda; dan
d. Jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Ruas jalan Alu Luhop – Buket Hagu, melalui:
1. SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
2. SWP I.F Blok I.F.4.
b. Ruas jalan Alue le Puteh – Buket Hagu melalui SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;

c. Ruas Jl. Lhoksukon – Cot Girek melalui SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.5;
d. Ruas Km. IV – Cot Hasan, melalui:
   1. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
   2. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
e. Ruas Km. VII – Buket Mee, melalui;
   1. SWP I.A Blok I.A.1; dan
   2. SWP I.B Blok I.B.1.
f. Ruas KM. XII – Alue Leuhop, melalui:
   1. SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   2. SWP I.B Blok I.B.4;
   3. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
   4. SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
g. Ruas jalan Langkahan – PIR Trans A Leuhob melalui SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4;
h. Ruas jalan U Baro – Alue Drien, melalui:
   1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
   2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
i. Ruas jalan U Baro – Matang Teungoh Cot Girek, melalui;
   1. SWP I.A Blok I.A.3; dan
   2. SWP I.B Blok I.B.3.
j. Ruas jalan lainnya melalui SWP I.B Blok I.B.1.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Tempat Evakuasi Sementara yang berada di:
   1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok A,2;
   2. SWP I.C Blok I.C.1;
   3. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
   4. SWP I.F Blok I.F.2.
b. Tempat Evakuasi Akhir berada di SWP I.E Blok I.E.3.

(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Ruas jalan Alu Luhop – Buket Hagu, melalui:
   1. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
   2. SWP I.F Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.
b. Ruas jalan Alue le Puteh – Buket Hagu melalui SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
c. Ruas Jl. Lhoksukon – Cot Girek melalui SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.5;
d. Ruas KM. XII – Alue Leuhop, melalui:
   1. SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   2. SWP I.B Blok I.B.4;
   3. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
   4. SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
e. Ruas jalan Langkahan – PIR Trans A Leuhob melalui SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4; dan
f. Ruas jalan lainnya melalui SWP I.E Blok I.E.4 dan Blok I.E.5.

(5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Ruas jalan Alu Luhop – Buket Hagu, melalui:
   1. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
   2. SWP I.F Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

b. Ruas jalan Alue le Puteh – Buket Hagu melalui SWP I.E Blok I.E.1;
c. Ruas Jl. Lhoksukon – Cot Girek melalui SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
d. Ruas KM. XII – Alue Leuhop, melalui:
   2. SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   3. SWP I.B Blok I.B.4;
   4. SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.4; dan
   5. SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
e. Ruas jalan Langkahan – PIR Trans A Leuhob melalui SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4; dan
f. Ruas jalan lainnya melalui SWP I.E Blok I.E.4 dan Blok I.E.5.

(6) Ketentuan mengenai rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Rencana pola ruang meliputi:
   a. Zona lindung; dan
   b. Zona budi daya.

(2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Zona badan air (BA); dan
   b. Zona ruang terbuka hijau (RTH).

(3) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Zona badan jalan (BJ);
   b. Zona perkebunan rakyat (KR);
   c. Zona pertanian (P);
   d. Zona kawasan peruntukan industri (KPI);
   e. Zona perumahan (R);
   f. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
   g. Zona ruang terbuka non hijau (RTNH);
   h. Zona perdagangan dan jasa (K);
   i. Zona perkantoran (KT);
   j. Zona pengelolaan persampahan (PP);
   k. Zona transportasi (TR); dan
   l. Zona pertahanan dan keamanan (HK).

(4) Ketentuan mengenai rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Badan Air (BA)

Pasal 17

Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dengan luas 8,33 (delapan koma tiga tiga) hektare, meliputi:

a. SWP I.A dengan luas 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
b. SWP I.D dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare berada di Blok I.D.1.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 18

(1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dengan luas 11,17 (sebelas koma satu tujuh) hektare, meliputi:
   a. Sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
   b. Sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
   c. Sub-zona taman RW (RTH-5);
   d. Sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
   e. Sub-zona jalur hijau (RTH-8).
(2) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektare, berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 1,51 (satu koma lima satu) hektare berada di Blok I.A.5; dan
   b. SWP I.E dengan luas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare berada di Blok I.E.3.
(3) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,15 (tiga koma satu lima) hektare, berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektare berada di Blok I.A.4;
   b. SWP I.E dengan luas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektare berada di Blok I.E.1 dan Blok I.E.4;
   c. SWP I.F dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare berada di Blok I.F.2.
(4) Sub-zona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare, berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
   b. SWP I.B dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektare berada di Blok I.B.2.
(5) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,46 (satu koma empat enam) hektare, berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare berada di Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;

b. SWP I.D dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare berada di Blok I.D.4;
c. SWP I.E dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare berada di Blok I.E.1; dan
d. SWP I.F dengan luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare berada di Blok I.F.2 dan Blok I.F.4.

(6) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 2,43 (dua koma empat tiga) hektare, berada di SWP I.A Blok I.A.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Badan Jalan (BJ)

Pasal 19

Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dengan luas 62,93 (enam puluh dua koma sembilan tiga) hektare, berada di:
a. SWP I.A dengan luas 18,40 (delapan belas koma empat nol) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B dengan luas 8,12 (delapan koma satu dua) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C dengan luas 5,73 (lima koma tujuh tiga) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D dengan luas 7,38 (tujuh koma tiga delapan) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4;
e. SWP I.E dengan luas 15,03 (lima belas koma nol tiga) hektare berada di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
f. SWP I.F dengan luas 8,25 (delapan koma dua lima) hektare berada di Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.

Paragraf 2
Zona Perkebunan Rakyat (KR)

Pasal 20

Zona perkebunan rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dengan luas 3.313,77 (tiga ribu tiga ratus tiga belas koma tujuh tujuh) hektare berada di:
a. SWP I.A dengan luas 58,56 (lima puluh delapan koma lima enam) hektare berada di Blok I.A.1. Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B dengan luas 309,22 (tiga ratus sembilan koma dua dua) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C dengan luas 705,25 (tujuh ratus lima koma dua lima) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D dengan luas 1.059,86 (seribu lima puluh sembilan koma delapan enam) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok D,4;
e. SWP I.E dengan luas 656,74 (enam ratus lima puluh enam koma tujuh empat) hektare berada di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan

f. SWP I.F dengan luas 524,16 (lima ratus dua puluh empat koma satu enam) hektare berada di Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.

Paragraf 3
Zona Pertanian (P)

Pasal 21

(1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dengan luas 816,53 (delapan ratus enam belas koma lima tiga) hektare, meliputi:
   a. Sub-zona tanaman pangan (P-1); dan
   b. Sub-zona perkebunan (P-3).
(2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 702,71 (tujuh ratus dua koma tujuh satu) hektare, berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 317,63 (tiga ratus tujuh belas koma enam tiga) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
   b. SWP I.B dengan luas 282,41 (dua ratus delapan puluh dua koma empat satu) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
   c. SWP I.C dengan luas 102,67 (seratus dua koma enam tujuh) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
(3) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas 594,98 (lima ratus sembilan puluh empat koma sembilan delapan) hektare, berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 299,53 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
   b. SWP I.B dengan luas 254,74 (dua ratus lima puluh empat koma tujuh empat) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
   c. SWP I.C dengan luas 40,71 (empat puluh koma tujuh satu) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
(4) Sub-zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 113,82 (seratus tiga belas koma delapan dua) hektare, berada di SWP I.A Blok I.A.5.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 22

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dengan luas 113,09 (seratus tiga belas koma nol sembilan) hektare, berada di:

a. SWP I.A dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektare berada di Blok I.A.4; dan
b. SWP I.F dengan luas 112,89 (seratus dua belas koma delapan sembilan) hektare berada di Blok I.F.1.

c.

Paragraf 5
Zona Perumahan (R)

Pasal 23

(1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e dengan luas 1.779,03 (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma nol tiga) hektare, meliputi:
a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
c. Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).

(2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 787,90 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma sembilan nol) hektare, berada di:
a. SWP I.A dengan luas 215,10 (dua ratus lima belas koma satu nol) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B dengan luas 145,94 (seratus empat puluh lima koma sembilan empat) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C dengan luas 51,42 (lima puluh satu koma empat dua) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D dengan luas 10,73 (sepuluh koma tujuh tiga) hektare berada di Blok I.D.3 dan Blok I.D.4;
e. SWP I.E dengan luas 216,73 (dua ratus enam belas koma tujuh tiga) hektare berada di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.6; dan
f. SWP I.F dengan luas 147,97 (seratus empat puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare berada di Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

(3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 821,60 (delapan ratus dua puluh satu koma enam nol) hektare, berada di:
a. SWP I.A dengan luas 195,91 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan satu) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok A,5;
b. SWP I.B dengan luas 183,95 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan lima) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C dengan luas 40,35 (empat puluh koma tiga lima) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
d. SWP I.D dengan luas 79,84 (tujuh puluh sembilan koma delapan empat) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.3;
e. SWP I.E dengan luas 277,32 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma tiga dua) hektare berada di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5 dan Blok I.E.6; dan
f. SWP I.F dengan luas 44,23 (empat puluh empat koma dua tiga) hektare berada di Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

(4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 169,53 (seratus enam puluh sembilan koma lima tiga) hektare, berada di SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 24

(1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f dengan luas 22,80 (dua puluh dua koma delapan nol) hektare, meliputi:
   a. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
   b. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
   c. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
   d. Sub-zona SPU skala RW (SPU-4).

(2) Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,16 (enam koma satu enam) hektare, berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 2,91 (dua koma sembilan satu) hektare berada di Blok I.A.4; dan
   b. SWP I.E dengan luas 3,24 (tiga koma dua empat) hektare berada di Blok I.E.3.

(3) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,12 (lima koma satu dua) hektare, berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
   b. SWP I.E dengan luas 2,60 (dua koma enam nol) hektare berada di Blok I.E.3; dan
   c. SWP I.F dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare berada di Blok I.F.2.

(4) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,47 (enam koma empat tujuh) hektare, berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 3,14 (tiga koma satu empat) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
   b. SWP I.B dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare berada di Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
   c. SWP I.C dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare berada di Blok I.C.1;
   d. SWP I.D dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare berada di Blok I.D.1;
   e. SWP I.E dengan luas 1,83 (satu koma delapan tiga) hektare berada di Blok I.E.3; dan
   f. SWP I.F dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare berada di Blok I.F.4.

(5) Sub-zona SPU skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5,05 (lima koma nol lima) hektare, berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 1,80 (satu koma delapan nol) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   b. SWP I.B dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
   c. SWP I.C dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare berada di Blok I.C.1;
   d. SWP I.D dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.4;

e. SWP I.E dengan luas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektare berada di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
f. SWP I.F dengan luas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare berada di Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

Paragraf 7
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pasal 25

Zona ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektare berada di:
a. SWP I.A dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare berada di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
b. SWP I.E dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare berada di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
c. SWP I.F dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare berada di Blok I.F.2.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 26

(1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h dengan luas 247,03 (dua ratus empat puluh tujuh koma nol tiga) hektare, meliputi:
   a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
   b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
   c. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
(2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 100,61 (seratus koma enam satu) hektare berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 100,60 (seratus koma enam nol) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
   b. SWP I.B dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare berada di Blok I.B.1.
(3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 97,50 (sembilan puluh tujuh koma lima nol hektare, berada di:
   a. SWP I.A dengan luas 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) hektare berada di Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
   b. SWP I.D dengan luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare berada di Blok I.D.4;
   c. SWP I.E dengan luas 35,61 (tiga puluh lima koma enam satu) hektare berada di Blok Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
   d. SWP I.F dengan luas 23,76 (dua puluh tiga koma tujuh enam) hektare berada di Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.
(4) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 48,93 (empat puluh delapan koma sembilan tiga) hektare, berada di:

a. SWP I.A dengan luas 6,43 (enam koma empat tiga) hektare berada di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B dengan luas 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) hektare berada di Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C dengan luas 6,35 (enam koma tiga lima) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
d. SWP I.D dengan luas 14,43 (empat belas koma empat tiga) hektare berada di Blok I.D.1.

Paragraf 9
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 27

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i berupa perkantoran pemerintahan dengan luas 4,53 (empat koma lima tiga) hektare, meliputi:
a. SWP I.A dengan luas 2,51 (dua koma lima satu) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
b. SWP I.B dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare berada di Blok I.C.1;
d. SWP I.D dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare berada di Blok I.D.1;
e. SWP I.E dengan luas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare berada di Blok I.E.3; dan
f. SWP I.F dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektare berada di Blok I.F.2.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan (PP)

Pasal 28

Zona pengelolaan persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan luas 16,68 (enam belas koma enam delapan) hektare berada di SWP I.C Blok I.C.3.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 29

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k dengan luas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare berada di SWP I.A Blok I.A.5.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 30

(1) Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf l berupa Koramil 20/Cgk. dengan luas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare, berada di SWP I.A Blok I.A.5.

(2) Pengembangan zona pertahanan dan keamanan (HK) di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya Tahun 2024-2044.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Konfirmasi KKPR; dan
b. Program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Pasal 32

(1) Pelaksanaan KKKPR di Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotan Cot Girek dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 33

(1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan.

(2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
b. Lokasi;
c. Sumber pendanaan;
d. Instansi pelaksana; dan
e. Waktu dan tahapan pelaksanaan.

(3) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan program pengembangan Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya, meliputi:
a. Program perwujudan rencana struktur ruang; dan
b. Program perwujudan rencana pola ruang.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tempat di mana program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan yang tersebar pada Blok dalam SWP.

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
d. Swasta;
e. Masyarakat; dan/atau
f. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. Kementerian/lembaga;
b. Perangkat Daerah;
c. Swasta;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Pemangku kepentingan lainnya.

(7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, direncanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan waktu perencanaan, meliputi:
a. Tahap pertama pada tahun 2024 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
b. Tahap kedua pada tahun 2025-2029 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan
c. Tahap ketiga pada tahun 2030-2034 diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan;
d. Tahap ketiga pada tahun 2035-2039 diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
e. Tahap keempat pada tahun 2040-2044 diprioritaskan pada pemantapan.

(8) Ketentuan mengenai program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayah (6), dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
b. Acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Muatan peraturan zonasi pada Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya terdiri dari aturan dasar.

(3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. Ketentuan tata bangunan;
d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;

e. Ketentuan khusus; dan
f. Ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 35

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. Pemanfaatan yang diperbolehkan atau diizinkan (I);
b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T);
c. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B); dan
d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan (X).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Zona lindung; dan
b. Zona budi daya.

(3) Pemanfaatan yang diperbolehkan atau diizinkan (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(4) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan, meliputi:
a. T1 pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 07.00 sampai dengan 22.00;
b. T2 pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan jarak atau radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. T3 pemanfaatan terbatas kegiatan eksisting yang sudah beroperasi dan/atau komponen pendukung fungsi utama di dalam zona atau sub-zona;
d. T4 pemanfaatan terbatas kegiatan UMKM dan industri kecil di dalam zona atau sub-zona dengan nilai investasi kurang dari 1 M dan maksimal kebisingan 60 dB;
e. T5 pemanfaatan terbatas selama 5 tahun pertama sesuai ketentuan kegiatan pada periode berikutnya mempertimbangkan persetujuan instansi yang mengelola sektor industri; dan
f. T6 pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan luasan tertentu.

(5) Pemanfaatan bersyarat tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, meliputi:
a. B1 pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan syarat mendapatkan persetujuan lingkungan hidup dan/atau Analisa Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. B2 pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan pada ketentuan prasarana dan sarana minimal;
c. B3 lahan sawah yang masuk dalam petak sawah dan tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sesuai bidang tanah dari instansi terkait bidang pertanian tanaman pangan;
d. B4 pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan syarat wajib melibatkan produk UMKM lokal; dan
e. B5 pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan syarat wajib berada dilokasi pusat perdagangan kaki lima.

(6) Pemanfaatan yang tidak diizinkan (X) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

(7) Ketentuan mengenai ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub-zona tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. KDB maksimum;
b. KLB maksimum;
c. KDH minimum;
d. KTB maksimum; dan
e. Luas kaveling minimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) berlaku untuk zona yang ditentukan.

(3) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf e berlaku untuk perumahan (R), meliputi:
a. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) seluas 80 (delapan puluh) meter persegi;
b. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) seluas 100 (tujuh puluh lima) meter persegi;

c. Luas minimal bidang tanah sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 120 (seratus) meter persegi; dan
d. Ketentuan luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
   1. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
   2. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum; dan
   3. pengembangan perumahan bersubsidi.

(4) Ketentuan mengenai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. GSB minimum;
   b. TB maksimum;
   c. JBS minimum; dan
   d. JBB minimum.

(2) Ketentuan mengenai ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasana dan Sarana Minimum

Pasal 38

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d, meliputi:
   a. Jalur pejalan kaki;
   b. Utilitas perkotaan;
   c. Prasarana lingkungan;
   d. Ruang terbuka hijau;
   e. Ruang terbuka non hijau;
   f. Fasilitas pendukung; dan
   g. Saluran irigasi teknis.

(2) Setiap zona atau sub-zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan tanah yang terdapat saluran irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam proses pembangunan harus menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 39

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:
   a. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
   b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
   c. Ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
   d. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA).
(2) Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada zona-zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
(3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar sesuai dengan tuntutan kekhususannya.
(4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.1, Lampiran IX.2, Lampiran IX.3 dan Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pasal 40

(1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdapat di:
   a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
   b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
   c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
(2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan bertampalan dengan pola ruang zona pertanian sub zona tanaman pangan.
(3) Pengaturan yang diatur dalam ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:
   a. Penyediaaan jaringan irigasi;
   b. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
   c. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
      1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
      2. terjadi bencana.

d. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
   1. Jalan umum;
   2. Waduk;
   3. Bendungan;
   4. Irigasi;
   5. Saluran air minum atau air bersih;
   6. Drainase dan Sanitasi;
   7. Bangunan Pengairan;
   8. Pelabuhan;
   9. Bandar udara;
   10. Stasiun dan jalan kereta api;
   11. Terminal;
   12. Fasilitas keselamatan umum;
   13. Cagar alam; dan/atau
   14. Pembangkit dan jaringan listrik.

e. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
   1. memiliki kajian kelayakan strategis;
   2. mempunyai rencana ahli fungsi lahan;
   3. pembebasan kepemilikan hak atas tanah dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai yang ditetapkan lembaga pertanahan; dan
   4. ketersediaan lahan pengganti yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan (luasan hamparan, tingkat produktivitas, dan kondisi infrastruktur dasar) dan dalam kondisi siap tanam.

f. Selain kepentingan umum alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

g. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

h. Penetapan suatu kejadian sebagai bencana dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

j. Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus Rawan Bencana

Pasal 41

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Resiko bencana banjir bandang tinggi; dan
b. Resiko bencana likeufaksi tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana resiko bencana banjir bandang tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana resiko bencana banjir bandang tinggi bertampalan dengan pola ruang:
a. Zona badan air sub zona badan air;
b. Zona badan jalan sub zona badan jalan;
c. Zona perdagangan dan jasa sub zona perdagangan dan jasa skala WP;
d. Zona perkantoran sub zona perkantoran;
e. Zona sarana pelayanan umum sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dan sub zona sarana pelayanan umum skala RW;
f. Zona sarana perumahan sub zona perumahan kepadatan sedang dan sub zona perumahan kepadatan tinggi; dan
g. Zona pertanian sub zona tanaman pangan dan sub zona perkebunan.

(4) Pengaturan yang diatur dalam ketentuan khusus kawasan rawan bencana resiko bencana banjir meliputi:
a. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari ketentuan dasar pada intensitas pemanfaatan ruang;
b. Menyediakan ruang dan jalur evakuasi bencana di setiap bangunan umum;
c. Pengendalian kegiatan di zona lindung;
d. Kegiatan budidaya yang saat ini sudah terbangun, wajib mengembangkan drainase yang mengalirkan air limpasan hujan;
e. Pengembangan prasarana dan sarana tanggap bencana;
f. Pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana;
g. Pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai sepanjang sungai yang rawan menjadi penyebab terjadinya banjir;
h. Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu untuk mengurangi terjadinya bahaya banjir. hal yang bisa dilakukan diantaranya dengan reboisasi dan pembangunan sistem peresapan serta pembangunan bendungan/waduk; dan
i. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana resiko bencana likuefaksi tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdapat di:
a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;

b. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
c. SWP I.C Blok I.C.2; dan
d. SWP I.D Blok I.D.1.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana resiko bencana likuefaksi tinggi bertampalan dengan pola ruang:
a. Zona badan air sub zona badan air;
b. Zona badan jalan sub zona badan jalan;
c. Zona ruang terbuka hijau sub zona taman kelurahan, sub zona taman RW, sub zona pemakaman, dan sub zona jalur hijau;
d. Zona perdagangan dan jasa sub zona perdagangan dan jasa skala kota, sub zona perdagangan dan jasa skala WP, dan sub zona perdagangan dan jasa skala SWP;
e. Zona perkantoran sub zona perkantoran;
f. Zona perkebunan rakyat sub zona perkebunan rakyat;
g. Zona sarana perumahan sub zona perumahan kepadatan tinggi dan sub zona perumahan kepadatan sedang;
h. Zona ruang terbuka non hijau sub zona ruang terbuka non hijau;
i. Zona sarana pelayanan umum sub zona sarana pelayanan umum skala kota, sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan, sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan, dan sub zona sarana pelayanan skala RW;
j. Zona transportasi sub zona transportasi; dan
k. Zona pertanian sub zona tanaman pangan dan sub zona perkebunan.

(7) Pengaturan yang diatur dalam ketentuan khusus kawasan rawan bencana resiko bencana likuefaksi tinggi meliputi:
a. terbatas dan bersyarat untuk pembangunan industri/pabrik, hunian/permukiman dengan pengarahan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko likuifaksi;
b. tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan, haris mematuhi persyaratan amdal;
c. dalam menetapkan jenis konstruksi/bangunan didahului penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, daya dukung tanah, memperkecil lereng, jalan mengikuti kontur, dan lain-lain;
d. tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuifaksi harus diabaikan;
e. rekayasa teknik bangunan tahan likuifaksi dengan membuat pondasi hingga ke lapisan batu keras;
f. tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan;
g. menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi;
h. meningkatkan kekuatan tanah, membuat tanah menjadi padat/keras (*soil compaction*);
i. menyediakan ruang dan jalur evakuasi bencana di setiap bangunan umum;
j. pengembangan prasarana dan sarana tanggap bencana; dan
k. pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diuraikan dan digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2.1 dan Lampiran IX.2.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 42

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Sempadan sungai; dan
   b. Sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5.
(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai bertampalan dengan pola ruang:
   a. Zona badan jalan sub zona badan jalan;
   b. Zona ruang terbuka hijau sub zona jalur hijau;
   c. Zona perdagangan dan jasa sub zona perdagangan dan jasa skala kota dan sub zona perdagangan dan jasa skala WP;
   d. Zona perkantoran sub zona perkantoran;
   e. Zona perumahan sub zona perumahan kepadatan sedang dan sub zona perumahan kepadatan tinggi;
   f. Zona sarana pelayanan umum sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan;
   g. Zona pertanian sub zona perkebunan; dan
   h. Zona transportasi sub zona transportasi.
(4) Pengaturan yang diatur dalam ketentuan khusus kawasan sempadan sungai meliputi:
   a. setiap pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai perlu memperoleh rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I;
   b. memberikan kelonggaran kepada ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai untuk menyesuaikan dengan ketentuan tertentu untuk tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang;
   c. pembatasan pertumbuhan pemanfaatan ruang pada area sempadan sungai dengan sebagai berikut:
      1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
      2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
      3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
   d. Sempadan sungai diarahkan hanya dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,

bangunan ketenagalistrikan, dan bangunan perkuatan tebing sungai dan badan air;

e. Sempadan sungai yang sudah memiliki status hak milik dapat membangun dengan KDB 30 (sepuluh) persen;
f. melarang kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis kawasan, dengan mengubah dan/ atau merusak bentang alam, serta kelestarian fungsi sungai, termasuk akses terhadap kawasan sungai; dan
g. bangunan pendukung aktivitas wisata harus berbentuk panggung dengan KDB maksimal 10%.

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdapat di:
a. SWP I.C Blok I.C.2; dan
b. SWP I.D Blok I.D.1.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk bertampalan dengan pola ruang:
a. Zona badan jalan sub zona badan jalan;
b. Zona perkebunan rakyat sub zona perkebunan rakyat; dan
c. Zona pertanian sub zona tanaman pangan.

(7) Pengaturan yang diatur dalam ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk meliputi:
a. paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi waduk; dan
b. penetapan garis sempadan waduk mengacu pada kajian penetapan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik waduk, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kegiatan operasi pemeliharaan waduk.

(8) Ketentuan khusus mengenai kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 43

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Tempat evakuasi sementara; dan
b. Tempat evakuasi akhir.

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat di:
a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
b. SWP I.B Blok I.B.2;
c. SWP I.C Blok I.C.1;
d. SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
e. SWP I.F Blok I.F.2.

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara bertampalan dengan pola ruang:
a. Zona perkantoran sub zona perkantoran;
b. Zona ruang terbuka hijau sub zona taman kelurahan;
c. Zona ruang terbuka non hijau sub zona ruang terbuka non hijau; dan
d. Zona sarana pelayanan umum sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan, sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan, dan sub zona sarana pelayanan umum skala RW.

(4) Pengaturan yang diatur dalam ketentuan khusus tempat evakuasi sementara meliputi:
a. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup memadai;
b. mudah diakses oleh korban bencana maupun penolong;
c. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
d. ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara terutama bagi kelompok rentan (lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel);
e. adanya kemudahan akses mobilisasi (perpindahan ke lokasi yang lebih aman) secara cepat;
f. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;
g. ketersediaan sarana pertolongan pertama (*emergency kits*);
h. ketersedian akses transportasi memadai (mobilisasi transportasi) yang akan membawa ke tempat yang lebih aman secara cepat dan aman;
i. ketersediaan peta ruang evakusi dan jalur evakuasi bencana yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat.
j. memperhatikan waktu tempuh ke lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit;
k. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 (empat ratus) hingga 600 (enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; dan
l. jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir.

(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.E Blok I.E.3.

(6) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara bertampalan dengan pola ruang zona ruang terbuka hijau sub zona taman kecamatan.

(7) Pengaturan yang diatur dalam ketentuan khusus tempat evakuasi akhir meliputi:
a. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup memadai;
b. mudah diakses oleh korban bencana maupun penolong;
c. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
d. ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara terutama bagi kelompok rentan (lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel);
e. adanya kemudahan akses mobilisasi (perpindahan ke lokasi yang lebih aman) secara cepat;
f. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;
g. ketersediaan sarana pertolongan pertama (emergency kits);

h. ketersediaan akses transportasi memadai (mobilisasi transportasi) yang akan membawa ke tempat yang lebih aman secara cepat dan aman;
i. ketersediaan peta ruang evakusi dan jalur evakuasi bencana yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat.
j. memperhatikan waktu tempuh ke lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit;
k. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 (empat ratus) hingga 600 (enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; dan
l. jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f, meliputi:
a. Ketentuan pemberian intensif dan disinsentif;
b. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang; dan
c. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.

(2) Ketentuan pemberian intensif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan untuk:
a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.

(3) Ketentuan pemberian intensif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Insentif; dan
b. Disinsentif.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya, meliputi:
a. Fasilitasi KKPR dan kemudahan perijinan;
b. Keringanan pajak atau distribusi;
c. Subsidi pembangunan prasarana;
d. Penghargaan; dan
e. Bantuan biaya pendidikan dan kesehatan.

(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberikan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
a. Kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan;
b. Kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau;
c. Pengenaan pajak atau retribusi tinggi;
d. Peningkatan biaya pajak balik nama; dan
e. Kewajiban memberikan pengantian lahan.

(6) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah Daerah; dan
b. Masyarakat.

(8) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
a. Insentif berupa fasilitasi persetujuan KKPR dan kemudahan perijinan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pengembang atau masyarakat yang memiliki nilai investasi besar dan atau mampu menyerap tenaga kerja lokal sebesar 60% dari tenaga kerja yang dibutuhkan;
b. Insentif berupa pemberikan keringan pajak atau retribusi maksimal 20% diberikan kepada pemilik bangunan dengan fungsi dan zoning kecuali tanaman pangan yang tepat serta intensitas bangunan dan masa bangunan tidak terjadi penyimpangan dari KLB, KDB, KDH, dan KTB;
c. Insentif berupa pemberian subsidi pembangunan prasarana maksimal 30% dan penghargaan berupa *running text* diberikan kepada pengembang atau investor yang akan membangun usaha industri UMKM yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal serta dapat mengolah limbah padat dan cair yang dihasilkan; dan
d. Insentif berupa pengurangan pajak bumi bangunan maksimal 70% dan pemberikan bantuan biaya pendidikan dan kesehatan maksimal 50% diberikan pemilik zona tanaman pangan yang berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mempertahankan fungsi zoning, ketentuan intensitas dan tata masa bangunan yang tepat.

(9) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut:
a. Disinsentif berupa kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan dalam bentuk kompensasi fiscal terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif Pemanfaatan Ruang;
b. Disinsentif berupa kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% diberikan kepada pengembang atau investor dengan ketinggian melebihi yang telah ditentukan pada ketentuan intensitas tata bangunan dan tata masa bangunan;
c. Disinsentif berupa pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi diberikan kepada bangunan yang tidak sesuai dengan arahan tata ruang (KDB, KDH dan KTB) yang telah ditentukan dan pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang hampir atau telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
d. Disinsentif berupa peningkatan biaya pajak balik nama minimal 30% dan kewajiban memberikan penggantian lahan seluas lahan yang dikonversi diberikan kepada pemilik zona tanaman pangan yang berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melanggar fungsi zoning, ketentuan intensitas dan tata masa bangunan.

(10) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang selain zona lindung dan/atau sub-zona tanaman pangan (P-1), pemanfaatannnya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi;
b. Pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang yang salah satunya berupa zona lindung dan/atau sub-zona tanaman pangan (P-1) maka berlaku ketentuan proporsional;
c. Pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan zona ruang terbuka hijau (RTH), lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak tanpa mengurangi luas zona ruang terbuka hijau (RTH) yang ditetapkan;
d. Pelaksanaan pemanfaatan ruang jaringan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum yang berbeda dengan peraturan Bupati ini dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian Forum Penataan Ruang atau Dinas yang membidangi urusan penataan ruang; dan
e. Hak atas tanah dapat diterbitkan di zona lindung dan zona budi daya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(11) Penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 45

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
(2) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten.
(3) Anggota Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas:
a. Perangkat daerah;
b. Asosiasi profesi;
c. Asosiasi akademisi; dan
d. Tokoh masyarakat.
(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten.

BAB X
SANKSI

Pasal 46

Terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya Tahun 2024-2044 adalah 20 (dua puluh) tahun dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya Tahun 2024-2044 dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
   d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Aceh Utara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya Tahun 2024-2044 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
   a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
   b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
   c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya Tahun 2024-2044 ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

a. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
d. Izin pemanfaatan ruang yang telah berakhir masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
e. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 20 Maret 2024 M
9 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 20 Maret 2024 M
9 Ramadhan 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

BAYAN ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR .... TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA
TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
A	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**															
A.1	Perwujudan Pusat Pelayanan															
A.1.1	Pengembangan & Penataan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK)															
1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Meunasah Teungoh Lt)	SWP I.A Blok I.A.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara., Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara., Satpol PP	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Monitoring Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Mesjid Batu XII).	SWP I.A Blok I.A.4														
3	Rehabilitasi Meunasah Cot Asan	SWP I.B Blok I.B.3														
4	Rehabilitasi Meunasah U-Baro	SWP I.A Blok I.A.3														
5	Pembatasan pengembangan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	SWP I.A Blok I.A.4														
6	Pengarahan pertumbuhan permukiman ke arah vertikal	SWP I.A Blok I.A.4														
7	Penyusunan RTBL sepanjang jalan kolektor Batu XII	SWP I.A Blok I.A.4														
A.1.2	Perwujudan SPPK															
1	Penataan koridor jalan local Perkotaan	SWP I.A Blok I.A.3; Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.E Blok I.E.3 SWP I.F Blok I.F.2	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara., Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara., Satpol PP	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Meningkatkan dan melengkapi fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan	SWP I.A Blok I.A.3; Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.E Blok I.E.3 SWP I.F Blok I.F.2														
3	Pembatasan pengembangan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	SWP I.A Blok I.A.3; Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.E Blok I.E.3 SWP I.F Blok I.F.2														
4	Pengembangan pusat pertumbuhan baru	SWP I.A Blok I.A.3; Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.E Blok I.E.3 SWP I.F Blok I.F.2														
5	Penyusunan RTBL Landmark Alue Leuhop	SWP I.F Blok I.F.2														
A.1.3	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa															
1	Penataan koridor jalan lingkungan	SWP I.A Blok I.A.1; Blok I.A.2; Blok I.A.3; Blok I.A.4;	APBD Kabupaten Aceh			Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara.,										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.1; Blok I.B.3; Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1;	Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara., Satpol PP	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Penyediaan PSU pendukung layanan lingkungan	SWP I.A Blok I.A.1; Blok I.A.2; Blok I.A.3; Blok I.A.4; Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.1; Blok I.B.3; Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1;														
3	Pembatasan pengembangan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	SWP I.A Blok I.A.1; Blok I.A.2; Blok I.A.3; Blok I.A.4; Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.1; Blok I.B.3; Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1;														
4	Pengembangan Pusat Lingkungan termasuk pengembangan, penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan serta peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas untuk menunjang fungsi pusat lingkungan	SWP I.A Blok I.A.1; Blok I.A.2; Blok I.A.3; Blok I.A.4; Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.1; Blok I.B.3; Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1;														
A.1.4	Penataan Pasar Terpadu & Alun-alun															
1	Penyusunan Rencana Penataan Pasar Terpadu Cot Girek (1 ha)	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara., Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara., Disperindakop & UKM Aceh Utara, Satpol PP,	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Pembangunan Pasar Terpadu Cot Girek	SWP I.A Blok I.A.5														
3	Penyusunan Rencana Penataan Alun-alun Kecamatan (1 ha).	SWP I.A Blok I.A.5														
4	Pengembangan Sarana Penunjang pada Alun-alun Kecamatan	SWP I.A Blok I.A.5														
A.2	**Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi**															
A.2.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
A2.1.1	Perwujudan Jaringan Transportasi															
1	Pembangunan jalan nasional jalan tol ruas jalan Langsa - Lhoksumawe	SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan			-									
2	Pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional jalan tol ruas jalan Langsa - Lhoksumawe	SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Peningkatan jalan kolektor primer:															
	Ruas Alu Luhop - Buket Hagu	SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6 SWP I.F Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta,		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain,									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Ruas Jl. Lhoksukon - Cot Girek	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	Masyarakat, Sumber Lain				Masyarakat, Sumber Lain									
	Pelebaran Jl Lhoksukon - Cot Girek (2 lajur, 2 jalur)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5														
	Ruas Jalan Alue Ie Puteh - Trans Unit V	SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
	Ruas Jalan KM. XII - Alue Leuhop	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.4 SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4 SWP I.E Blok I.E.6 SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2													
	Ruas Jalan Langkahan - PIR Trans A Leuhob	SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4														
4	Peningkatan jalan kolektor sekunder:															
	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup peningkatan jalan	SWP I.C Blok I.C.3 SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.6	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
	Ruas Jalan Alue Leuhob - Buket Hagu	SWP I.C Blok I.C.3 SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.6	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Pelaksanaan pemeliharaan jalan kolektor															
	Ruas Alu Luhop - Buket Hagu	SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6 SWP I.F Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
	Ruas Jl. Lhoksukon - Cot Girek	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5														
	Ruas Jalan Alue Ie Puteh - Trans Unit V	SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
	Ruas Jalan KM. XII - Alue Leuhop	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.4 SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4 SWP I.E Blok I.E.6 SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2													
	Ruas Jalan Langkahan - PIR Trans A Leuhob	SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4														
	Ruas Jalan Alue Leuhob - Buket Hagu	SWP I.C Blok I.C.3 SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.6														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
6	Pembangunan jalan khusus (Jalan Line Pipa Matang Peusangan - Krueng Jambo Aye)	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
7	Peningkatan jalan lokal primer:															
	Ruas jalan Alue Seumambu - Cot Girek/ Serba Jadi	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
	Ruas jalan Km. IV - Cot Hasan	SWP I.B Bok B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2														
	Ruas jalan Km. VII - Buket Mee	SWP I.A Blok I.A.1 SWP I.B Blok I.B.1														
	Ruas jalan Simpang Alue Seumambu - Matang Teungoh	SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4														
	Ruas jalan U Baro - Alue Drien	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3														
	Ruas jalan U Baro - Matang Teungoh Cot Girek	SWP I.A Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.3														
	Ruas jalan lokal primer lainnya	SWP I.B Blok I.B.1 SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4														
8	Pelaksanaan pemeliharaan jalan lokal primer:															
	Ruas jalan Alue Seumambu - Cot Girek/ Serba Jadi	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
	Ruas jalan Km. IV - Cot Hasan	SWP I.B Bok B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2														
	Ruas jalan Km. VII - Buket Mee	SWP I.A Blok I.A.1 SWP I.B Blok I.B.1														
	Ruas jalan Simpang Alue Seumambu - Matang Teungoh	SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4														
	Ruas jalan U Baro - Alue Drien	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3														
	Ruas jalan U Baro - Matang Teungoh Cot Girek	SWP I.A Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.3														
	Ruas jalan lokal primer lainnya	SWP I.B Blok I.B.1 SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4														
9	Peningkatan jalan lokal sekunder:															
	Ruas jalan Alue Drien - Meunasah Buloh	SWP I.A Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.2	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta,		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
	Ruas Jalan Batu XII - Kampung Tempel	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5														
	Ruas Jalan Batu XII - Pondok Titi	SWP I.A Blok I.A.5														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Ruas Jalan Kampung Bantan - Pucok Alue	SWP I.B Blok I.B.3 dan B.4 SWP I.C Blok I.C.2 SWP I.D Blok I.D.1	Masyarakat, Sumber Lain													
	Ruas Jalan Kampung Lalang - Kampung Bantan	SWP I.C Blok I.C.2 SWP I.D Blok I.D.1														
	Ruas jalan Lhok Reuhat - Km. VIII	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2														
	Ruas Jalan Pinto Rimba - Pucok Alue	SWP I.B Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 SWP I.D Blok I.D.1														
	Ruas Jalan Rimba Karya - Alue Leuhop	SWP I.F Blok I.F.1														
	Ruas Jalan Simpang Buket Yamaha - Kampung Lalang	SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2														
	Ruas Jalan Simpang Buloh - Krueng Peutou	SWP I.A Blok I.A.4														
	Ruas Jalan Simpang Ceumpeudak - Ulee Gampong	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4														
	Ruas Jalan Simpang Jalan Puskesmas XII - Jalan Buloh	SWP I.A Blok I.A.4														
	Ruas jalan lokal sekunder lainnya	SWP I.A Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.3 SWP I.E Blok I.E.2 SWP I.F Blok I.F.4														
10	Pelaksanaan pemeliharaan jalan lokal sekunder:															
	Ruas jalan Rimba Karya - Alue Leuhop	SWP I.F Blok I.F.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
	Ruas jalan lokal sekunder lainnya	SWP I.A , SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F														
11	Peningkatan jalan lingkungan primer:															
	Ruas jalan Batu XII - Kampung Tempel	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
	Ruas Jalan Batu XII - Pondok Titi	SWP I.A Blok I.A.5														
	Ruas jalan Bintang Hu Trans - Buket Hagu Trans	SWP I.D Blok I.D.3 SWP I.E Blok I.E.3, Blok I.E.4 dan Blok I.E.6														
	Ruas jalan Buket Selamat - U Baro	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3														
	Ruas jalan Kampung Bantan - Pucok Alue	SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.2, dan SWP I.D Blok I.D.1														
	Ruas Jalan Kampung Lalang - Kampung Bantan	SWP I.D Blok I.D.1														
	Ruas jalan Lhok Reuhat - Km VIII	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2														
	Ruas jalan Pinto Rimba - Pucok Alue	SWP I.B Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 SWP I.D Blok I.D.1														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Ruas jalan Rimba Karya - Alue Leuhop	SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2														
	Ruas jalan Buket Yamaha - Kampung Lalang	SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2														
	Ruas jalan Simpang Buloh - Krueng Peutou	SWP I.A Blok I.A.4														
	Ruas jalan Simpang Jalan Puskesmas XII - Jalan Buloh	SWP I.A Blok I.A.4														
	Ruas jalan Teupin Keubeu - Lhok Kareung	SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.1														
	Ruas jalan lingkungan primer lainnya	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E														
12	Pelaksanaan pemeliharaan jalan lingkungan primer:															
	Ruas jalan Batu XII - Kampung Tempel	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
	Ruas Jalan Batu XII - Pondok Titi	SWP I.A Blok I.A.5														
	Ruas jalan Bintang Hu Trans - Buket Hagu Trans	SWP I.D Blok I.D.3 SWP I.E Blok I.E.3, Blok I.E.4 dan Blok I.E.6														
	Ruas jalan Buket Selamat - U Baro	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3														
	Ruas jalan Kampung Bantan - Pucok Alue	SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.2, dan SWP I.D Blok I.D.1														
	Ruas Jalan Kampung Lalang - Kampung Bantan	SWP I.D Blok I.D.1														
	Ruas jalan Lhok Reuhat - Km VIII	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2														
	Ruas jalan Pinto Rimba - Pucok Alue	SWP I.B Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 SWP I.D Blok I.D.1														
	Ruas jalan Rimba Karya - Alue Leuhop	SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2														
	Ruas jalan Buket Yamaha - Kampung Lalang	SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2														
	Ruas jalan Simpang Buloh - Krueng Peutou	SWP I.A Blok I.A.4														
	Ruas jalan Simpang Jalan Puskesmas XII - Jalan Buloh	SWP I.A Blok I.A.4														
	Ruas jalan Teupin Keubeu - Lhok Kareung	SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.1														
	Ruas jalan lingkungan primer lainnya	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E														
13	Peningkatan jalan lingkungan sekunder	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 SWP I.C Blok I.C.3 SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3 SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
14	Pelaksanaan pemeliharaan jalan lingkungan sekunder	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 SWP I.C Blok I.C.3 SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta,		Dinas Perhubungan Aceh, Dinas PUPR Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.4	Masyarakat, Sumber Lain													
15	Peningkatan sarana pendukung sistem transportasi berupa ruang parkir, lampu penerangan jalan, dan kelengkapan rambu lalu lintas lainnya sesuai standar teknis yang berlaku	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
16	Pembatasan kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas pada rumij	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
17	Peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan lokal primer di bagian pedalaman	Langkahan - Buket Hagu	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
18	Pelebaran Jembatan di depan Kantor Camat Cot Girek (p.16 m)	SWP I.A Blok I.A.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
19	Pengembangan median jalan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E dan SWP I.F	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
20	Perkerasan jalan Ruas Alu Luhop - Buket Hagu	SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6 SWP I.F Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
21	Perkerasan jalan Ruas Jl. Lhoksukon - Cot Girek	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta,		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			Masyarakat, Sumber Lain													
22	Perbaikan jalan rusak	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
23	Pemeliharaan kualitas jalan secara berkala	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
A2.1.2	Pengelolaan Terminal Barang															
1	Penyusunan RTBL Pembangunan Terminal Barang	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	-	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Penyusunan Masterplan C di Cot Girek	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	-	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Penyusunan DED Terminal Barang	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	-	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
A2.1.3	Penataan & Perbaikan Jembatan															
1	Pembangunan Jembatan Beton di Alue Drien (5 m)	SWP I.B Blok I.B.2	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Pembangunan Jembatan Baja (p.56 m)	SWP I.A Blok I.B.5														
3	Pemeliharaan Rutin Jembatan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4.														
A2.1.4	Penataan Jalur Sepeda & pedestrian/Trotoar															
1	Pembangunan jalur pejalan kaki															
	Ruas jalan Alu Luhop - Buket Hagu	SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6\ dan SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Bappeda Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	Ruas jalan Alue Ie Puteh - Trans Unit V	SWP I.E Blok I.E.1														
	Ruas jalan Jl. Lhoksukon - Cot Girek	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5														
	Ruas jalan KM. XII - Alue Leuhop	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.4 SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2														
	Ruas jalan Langkahan - PIR Trans A Leuhob	SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4														
	Ruas jalan lainnya	SWP I.E Blok I.E.4 dan Blok I.E.5														
2	Pembangunan jalur sepeda															
	Ruas jalan Alu Luhop - Buket Hagu	SWP I.E dan SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Bappeda Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	Ruas jalan Alue Ie Puteh - Trans Unit V	SWP I.E Blok I.E.1														
	Ruas jalan Jl. Lhoksukon - Cot Girek	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5														
	Ruas jalan KM. XII - Alue Leuhop	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.4 SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4 SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2														
	Ruas jalan Langkahan - PIR Trans A Leuhob	SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4														
	Ruas jalan lainnya	SWP I.E Blok I.E.4 dan Blok I.E.5														
3	Pembangunan jalur evakuasi bencana															
	Ruas jalan Alu Luhop - Buket Hagu	SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6 dan SWP I.F Blok I.F.4	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Bappeda Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	Ruas jalan Alue Ie Puteh - Trans Unit V	SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Ruas jalan Jl. Lhoksukon - Cot Girek	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5														
	Ruas jalan Km. IV - Cot Hasan	SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2														
	Ruas jalan Km.VII - Buket Mee	SWP I.A Blok I.A.1 SWP I.B Blok I.B.1														
	Ruas jalan KM. XII - Alue Leuhop	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.4 SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4 SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2														
	Ruas jalan Langkahan - PIR Trans A Leuhob	SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4														
	Ruas jalan U Baro - Alue Drien	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3														
	Ruas jalan U Baro -Matang Teungoh Cot Girek	SWP I.A Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.3														
A.3	Program Sistem Jaringan Energi															
1	Peningkatan dan perluasan jaringan listrik	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBN, APBD Provinsi Aceh, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	Kementrian ESDM	Dinas ESDM Aceh		PLN									
2	Pembangunan dan pemeliharaan SUTM	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	APBN, APBD Provinsi Aceh, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	Kementrian ESDM	Dinas ESDM Aceh		PLN									
3	Pembangunan dan pemeliharaan SUTR	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4,	APBN, APBD Provinsi Aceh,	Kementrian ESDM	Dinas ESDM Aceh		PLN									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain													
4	Pemelihaaan Gardu Distribusi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2 dan Blok I.F.4.	APBN, APBD Provinsi Aceh, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	Kementrian ESDM	Dinas ESDM Aceh		PLN									
A.4	Program Sistem Jaringan Telekomunikasi															
1	Pembangunan dan pengembangan jaringan telepon fixed line	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	Kementerian Kominfo	Diskominfo Aceh	Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Utara	Telkom									
2	Pengembangan jaringan serat optik	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	Kementerian Kominfo	Diskominfo Aceh	Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Utara	Telkom									
3	Pemeliharaan jaringan serat optik	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh	Kementerian Kominfo	Diskominfo Aceh	Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Utara	Telkom									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain													
4	Peningkatan/perluasan jaringan telekomunikasi dan seluler Aceh Utara	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	Kementerian Kominfo	Diskominfo Aceh	Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Utara	Telkom									
5	Pembangunan BTS	SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.A Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	Kementerian Kominfo	Diskominfo Aceh	Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Utara	Telkom									
6	Pembangunan STO	SWP I.A Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	Kementerian Kominfo	Diskominfo Aceh	Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Utara	Telkom									
7	Pemeliharaan BTS	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.E Blok I.E.3; dan SWP I.F Blok I.F.2	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	Kementerian Kominfo	Diskominfo Aceh	Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Utara	Telkom									
A.5	Program Sistem Jaringan Sumber Daya Air															
1	Pembangunan dan pemeliharaan pengamanan Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Kantor Pengairan dan ESDM Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2	Pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Pertanian Pangan Aceh Utara, Kantor Pengairan dan ESDM Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi tersier	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Pertanian Pangan Aceh Utara, Kantor Pengairan dan ESDM Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
4	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Pertanian Pangan Aceh Utara, Kantor Pengairan dan ESDM Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Pertanian Pangan Aceh Utara, Kantor Pengairan dan ESDM Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
6	Rehabilitasi dan pemeliharaan embung Pucok Alue	SWP I.D Blok I.D.1	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Kantor Pengairan dan ESDM Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
7	Pengawasan pembangunan jaringan irigasi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Kantor Pengairan dan ESDM Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
8	Pembangunan bangunan pengendali banjir	SWP I.A Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Kantor Pengairan dan ESDM Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
9	Pembangunan pintu air	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, SWP I.B Blok I.B.1	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Kantor Pengairan dan ESDM Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
10	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Kantor Pengairan dan ESDM Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
11	Normalisasi & Pengerukan ruas Sungai Krueng Keto (11,1 km)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
12	Pemasangan Turap Sungai Krueng Keto 11,1 km)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
13	Normalisasi & penerukan ruas Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.5.	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
14	Pemasangan Turap Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.5.	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
15	Penataan Sempadan Irigasi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaws Permukiman	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
16	Penyusunan regulasi pengendalian pemanfaatan air bawah tanah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD	BWS 1	Dinas Pengairan Aceh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaws Permukiman	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain													
A.6	Program Sistem Jaringan Air Minum															
1	Perluasan pelayanan air bersih perpipaan di perkotaan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan non DAK di Perkotaan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Perluasan pelayanan air bersih di pedesaan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
4	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di perdesaan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta,		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	Masyarakat, Sumber Lain		Kawasan Permukiman Aceh	Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
5	Pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi pembagi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
6	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi air minum	SWP I.A Blok I.A.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
7	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
8	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan transmisi air minum	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
9	Pembangunan hidran kebakaran	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1; SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain								
10	Penyusunan Rencana Fasilitas Pemadam Kebakaran	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
11	Pembangunan Fasilitas Komplek Damkar	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
12	Penataan Pengembangan Fasilitas Penunjang Damkar	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
13	Penyusunan regulasi pembatasan pemanfaatan air bawah tanah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
14	Optimalisasi jaringan perpipaan PDAM maupun sumber air baku lainnya	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	PDAM, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 -	2035 -	2040 -
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2044
A.7	Program Sistem Jaringan Limbah dan B3															
1	Pengembangan dan pengaktifan kembali IPLT	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik	SWP I.F Blok I.F.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Pembangunan dan pengembangan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP I.A Blok I.A.5 dan SWP I.F Blok I.F.2	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
4	Pengembangan masterplan pengelolaan air limbah Industri	SWP I.F Blok I.F.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Pengolahan limbah cair PKS dengan metode filtrasi dan fitoremedasi untuk mencapai baku mutu COD dan BOD sesuai Permen LH nomor 5 Tahun 2014	SWP I.F Blok I.F.1 dan SWP I.A Blok I.A.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
6	Pengembangan masterplan pengelolaan air limbah perkotaan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
7	Pengembangan sistem tangki septik individu untuk penanganan limbah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	domestik (rumah tangga)	Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara									
8	Pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah B3 di kawasan industri dan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh masing-masing pelaku usaha yang lokasinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
9	Mengadakan kerjasama dengan sawasta dalam penyedotan tinja	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
10	Mengembangkan program-program sanitasi berbasis masyarakat	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
11	Pengadaan truk tinja	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2,	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4			Kawasan Permukiman Aceh	dan Kebersihan Aceh Utara										
12	Konservasi lahan di kawasan sempadan Sungai Krueng Keto dan Irigasi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
A.8	Program Sistem Jaringan Pengelolaan Sampah															
1	Pengembangan TPA Sampah	SWP I.C Blok I.C.3	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Pembangunan TPS Sampah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Penyediaan prasarana persampahan berupa bak sampah atau container sampah pada lokasi TPS dan pusat-pusat aktivitas seperti perkantoran, perumahan, perdagangan dan jasa, serta sarana pelayanan umum	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4														
4	Peningkatan pengelolaan sampah di TPA dengan sistem *Sanitary Landfill*	SWP I.C Blok I.C.3	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Aceh	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Pengembangan *refuse derived fuel* dan atau *Intermediate Treatment Facility* dalam pengelolaan sampah sebagai sumber energi terbarukan	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
6	Pemanfataan sampah menjadi gas methan sebagai pengganti gas LPG	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
7	Penghijauan dengan vegetasi yang mampu menyerap CO2 dan mengurangi bau	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
8	Pengurangan timbunan sampah di TPA dengan biokonversi manggot	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
9	Penyusunan masterplan persampahan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E dan SWP I.F	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
10	Pengurangan sampah yang terbawa ke TPA dengan bank sampah kerajinan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara										
11	Pemeliharaan jaringan dan prasarana persampahan secara berkala	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
12	Sosialisasi dan edukasi berkala kepada masyarakat untuk pengurangan sampah melalui 3R dan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
13	Penyediaan dan pemeliharaan prasarana persampahan sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
14	Penanganan sampah dengan pemilahan, pengumpulan, penangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2,	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4			Kawasan Permukiman Aceh	dan Kebersihan Aceh Utara										
15	Pengembangan layanan angkutan sampah di lingkungan permukiman	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
16	Pengumpulan sampah berdasarkan 3 jenis kategori 3R	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
A.9	Program Sistem Jaringan Drainase															
1	Rehabilitasi sempadan Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara	Kemen PUPR	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara										
2	Pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi jaringan drainase primer	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.4; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara										
3	Pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi jaringan drainase sekunder	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;	APBD Provinsi Aceh, APBD		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	Kabupaten Aceh Utara		Permukiman Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh	Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara										
4	Pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi jaringan drainase tersier	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara										
5	Pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi jaringan drainase lokal	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.3; dan SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4 dan Blok I.E.6.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara										
6	Pembangunan bangunan peresapan (kolam retensi)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan SWP I.E Blok I.E.2	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara										
7	Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan peresapatan (kolam retensi)	SWP I.E Blok I.E.2	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh,	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 -	2035 -	2040 -
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2044
					Dinas Pengairan Aceh											
8	Penataan Jaringan drainase di jalan lokal	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara									
9	Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir dan anak Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara									
10	Pemeliharaan jaringan dan prasarana drainase primer, sekunder, tersier dan lokal secara berkala	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara									
11	Penyediaan dan pemeliharaan drainase jalan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
A.10	Program Sistem Jaringan Prasarana Lainnya															
1	Penyediaan dan pemeliharaan jalur, ruang dan rambu evakuasi bencana	Ruas jalan Alu Luhop – Buket Hagu, melalui: - SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan - SWP I.F Blok I.F.4. Ruas jalan Alue le Puteh – Buket Hagu melalui SWP I.E Blok I.E.1; Ruas Jl. Lhoksukon – Cot Girek melalui SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.5; Ruas Km. IV – Cot Hasan, melalui: - SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan - SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2. Ruas Km. VII – Buket Mee, melalui; - SWP I.A Blok I.A.1; dan - SWP I.B Blok I.B.1. Ruas KM. XII – Alue Leuhop, melalui: - SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; - SWP I.B Blok I.B.4; - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan - SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2. Ruas jalan Langkahan – PIR Trans A Leuhob melalui SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4; Ruas jalan U Baro – Alue Drien, melalui: - SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3. Ruas jalan U Baro – Matang Teungoh Cot Girek, melalui; - SWP I.A Blok I.A.3; dan - SWP I.B Blok I.B.3. Ruas jalan lainnya melalui SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		BPBA	BPBD, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Penyediaan jalur sepeda	Ruas jalan Alu Luhop – Buket Hagu, melalui: - SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan - SWP I.F Blok I.F.4. Ruas jalan Alue le Puteh –	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Buket Hagu melalui SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; Ruas Jl. Lhoksukon – Cot Girek melalui SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.5; Ruas KM. XII – Alue Leuhop, melalui: - SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; - SWP I.B Blok I.B.4; - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan - SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2. Ruas jalan Langkahan – PIR Trans A Leuhob melalui SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4; dan Ruas jalan lainnya melalui SWP I.E Blok I.E.4 dan Blok I.E.5														
3	Penyediaan jalur pejalan kaki	Ruas jalan Alu Luhop – Buket Hagu, melalui: SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.2, dan Blok I.F.4. Ruas jalan Alue le Puteh – Buket Hagu melalui SWP I.E Blok I.E.1; Ruas Jl. Lhoksukon – Cot Girek melalui SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.5; Ruas KM. XII – Alue Leuhop, melalui: SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.4; SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.4; dan SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2. Ruas jalan Langkahan – PIR Trans A Leuhob melalui SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4; dan Ruas jalan lainnya melalui SWP I.E Blok I.E.4 dan Blok I.E.5.	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain									
4	Penyediaan tempat evakuasi akhir	SWP I.E Blok I.E.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		BPBA	BPBD, Dinas PUPR Aceh Utara										
5	Penyediaan tempat evakuasi sementara	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A,2;	APBD Provinsi Aceh, APBD		BPBA	BPBD, Dinas PUPR Aceh Utara										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan SWP I.F Blok I.F.2.	Kabupaten Aceh Utara													
B	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**															
B.1	Perwujudan Zona Lindung															
B.1.1	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau															
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Sosialisasi Pemanfaatan Lahan public & Korporasi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Peningkatan kualitas ruang publik dan menciptakan ruang hijau yang indah, nyaman, dan aman untuk masyarakat di Taman Kecamatan	SWP I.A Blok I.A.5 dan SWP I.E Blok I.E.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
4	Peningkatan kualitas ruang publik dan menciptakan ruang hijau yang indah, nyaman, dan aman untuk masyarakat di Taman Kelurahan	SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.4, dan SWP I.F Blok I.F.2	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Peningkatan kualitas ruang publik dan menciptakan ruang hijau yang indah, nyaman, dan aman untuk masyarakat di Taman RW	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dan SWP I.B Blok I.B.2.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
6	Perawatan pemakaman secara rutin, termasuk pembersihan, pemotongan rumput, dan pemupukan tanaman.	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.D Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1; dan SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
7	Perbaikan dan penggantian fasilitas pemakaman yang rusak	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.D Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1; dan SWP I.F Blok I.F.2 dan Blok I.F.4.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
8	Pembangunan jalur hijau	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
9	Penanaman Pohon peneduh di sepanjang jalur irigasi	SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.E	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
10	Penanaman Pohon peneduh di sepanjang sempadan Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.E	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
11	Penanaman Pohon peneduh di sepanjang Kolam Retensi/Folder	SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.E	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
12	Strategi pemenuhan untuk mencapai 30% RTH (20% RTH publik dan 10% RTH privat) dengan:															
	▪ Penambahan RTH di dalam zona kawasan peruntukan industri (KPI)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	▪ Memanfaatkan kawasan sempadan Sungai Krueng Keto, waduk, dan embung untuk RTH	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
	▪ Mewajibkan pada pengembang perumahan baru untuk mengalokasikan 7% lahan perumahan menjadi RTH baik itu berupa lapangan olahraga maupun taman bermain	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4														
	▪ Pengembangan RTH di sekitar jalan untuk estetika kota dan mendukung citra kawasan Kota dengan pengembangan RTH di tepi jalan dan memanfaatkan median maupun pulau jalan untuk RTH	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	▪ Pengembangan RTH privat sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku (10% dari luas WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	▪ Pendataan lahan aset pemerintah untuk kepentingan pemenuhan RTH	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	▪ Pengadaan konsolidasi tanah untuk penataan ruang permukiman yang diintegrasikan dengan optimalisasi ruang untuk RTH	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	▪ Pengembangan RTH pada obyek ruang pada bangunan berupa taman atap, taman podium, taman balkon, taman koridor, taman vertikal, taman dalam pot, dan taman dalam kontainer	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	▪ Pengembangan ruang terbuka biru (RTB) sebagai potensi RTH berupa badan air, kolam retensi, polder, biopori, sumur resapan, dan/atau bioswale dengan perhitungan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	▪ Mewajibkan penyertaan pengembangan RTH publik sebagai bagian dari *corporate social responsibility* (Swasta, Masyarakat, Sumber Lain, Masyarakat, Sumber Lain) dengan pihak Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	▪ Sosialisasi terkait penggunaan grass block pada grey area	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	▪ Penerapan penggunaan grass block pada grey area utamanya pada kawasan Sarana Pelayanan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Umum (SPU), Perdagangan dan Jasa, Perkantoran, dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Hidup dan Kehutanan Aceh	Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
	▪ Pengembangan RTH di pola ruang perkebunan	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
13	Penyediaan RTH Publik untuk memenuhi target hingga 20%															
	▪ Tahap 1 19,19 ha (0,3%)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	▪ Tahap 2 63,98 ha (1%)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	▪ Tahap 3 101,08 ha (1,58%)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4														
B.1.2	Program Perlindungan Zona Badan Air															
1	Sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang badan air	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan air	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Pengembangan potensi RTH minimal sebesar 20% dari keseluruhan luas zona badan air (BA) sesuai perhitungan Indeks Hijau Biru Indonesia	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
4	Pengendalian kegiatan lindung agar tidak menggangu fungsi lindung	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	BWS 1	Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Sosialisasi pemanfaatan ruang sempadan Sungai Krueng Keto dan saluran irigasi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
6	Perlindungan kawasan sempadan Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
7	Rehabilitasi daerah tangkapan air Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
8	Konservasi lahan di kawasan sempadan Sungai Krueng Keto dan Irigasi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
9	Penghijauan kawasan sempadan Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
10	Pengendalian pembangunan perumahan di tepi Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
11	Penertiban bangunan di atas area sempadan Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			Kabupaten Aceh Utara			Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
12	Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan sempadan Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
13	Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan sempadan irigasi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
14	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
15	Peningkatan konservasi air tanah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
16	Penataan dan pengendalian daerah sekitar sempadan Sungai Krueng Keto sebagai wisata alam	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
17	Penataan dan pemantapan kualitas sempadan embung	SWP I.D Blok I.D.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
18	Pembatasan pengembangan sarana prasarana di sekitar kawasan lindung untuk menghindari alih fungsi lahan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
19	Pengerukan sedimen Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
20	Pemeliharaan parit gajah disekitar Sungai Krueng Keto	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara		Dinas PUPR Aceh.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
B.2	Perwujudan Zona Budi Daya															
B.2.1	Perwujudan Badan Jalan															
1	Melengkapi badan jalan dengan fasilitas pendukung, seperti jalur pedestrian, penerangan jalan umum (PJU), street furniture, dan sebagainya sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh	Dinas Perhubungan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4														
2	Pemeliharaan dan Operasional Badan Jalan Eksisting	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4			Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh	Dinas Perhubungan Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
B.2.2	Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat															
1	Pemantapan dan Pengembangan kegiatan perkebunan	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten Aceh Utara			Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Aceh Utara										
2	Penilaian usaha perkebunan	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten Aceh Utara			Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Aceh Utara										
3	Identifikasi dan pemetaan perkebunan	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten Aceh Utara			Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Aceh Utara										
4	Sosialisasi pemanfaatan lahan perkebunan kurma tropis	SWP I.A Blok I.A.1. Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D,4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.	APBD Kabupaten Aceh Utara			Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Aceh Utara										
5	Sosialisasi pemanfaatan lahan perkebunan sebagai kawasan agrowisata	SWP I.A Blok I.A.1. Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D,4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok	APBD Kabupaten Aceh Utara			Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Aceh Utara										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.														
B.2.3	Perwujudan Zona Pertanian															
1	Sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai pertanian	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
2	Pembangunan unit pelayanan terpadu agrobisnis	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
3	Penyulusan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
4	Perbaikan sistem irigasi persawahan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4														
5	Pengembangan pertanian organik dan pembatasan penggunaan pestisida	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
6	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian berupa embung, jalan usaha tani, dam parit, longstorage, dan prasarana lainnya	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
7	Perwujudan Sub-zona Tanaman Pangan															
	• Pemantapan dan Pengembangan kegiatan pertanian lahan basah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
	• Program penyediaan sarana dan prasarana pertanian	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
	• Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWPBlok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
	• Peningkatan dan Pengelolaan Teknologi Pertanian	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta,			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWPBlok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	Masyarakat, Sumber Lain													
	▪ Pengembangan potensi RTH minimal sebesar 10% dari keseluruhan luas zona pertanian (P)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWPBlok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
8	Perwujudan LP2B															
	▪ Penetapan batas dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWPBlok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
	▪ Sosialisasi pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWPBlok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
	▪ Perlindungan terhadap LP2B yang berada di sepanjang sisi jalan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara										
9	Perwujudan Sub-zona Perkebunan															
	▪ Pengembangan kegiatan pertanian di Kebun Campuran	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWPBlok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Dinas Pertanian & Pangan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
B.2.4	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)															
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Industri	SWP I.F Blok I.F.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Disperindag Aceh	Disperindakop & UKM Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Pembangunan Prasarana Dasar dan DED Fasilitas Penunjang Kawasan Industri	SWP I.F Blok I.F.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Disperindag Aceh	Disperindakop & UKM Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Pengembangan Fasilitas Pelengkap Jalan Kawasan Industri	SWP I.F Blok I.F.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta,		Dinas PUPR Aceh, Disperindag Aceh	Disperindakop & UKM Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			Masyarakat, Sumber Lain													
4	Penataan Jembatan Timbang dan Angkutan Barang	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Disperindag Aceh	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Pemantauan dan pengawasan kegiatan industri untuk mencegah pencemaran lingkungan	SWP I.F Blok I.F.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Disperindag Aceh	Disperindakop & UKM Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
6	Pengelolaan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	SWP I.F Blok I.F.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Disperindag Aceh	Disperindakop & UKM Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
7	Pembinaan dan pelatihan UMKM termasuk usaha pengembangan dan pemasaran produk UMKM	SWP I.F Blok I.F.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Disperindag Aceh	Disperindakop & UKM Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
8	Pengembangan potensi RTH minimal sebesar 20% dari keseluruhan luas zona kawasan peruntukan industri (KPI) sesuai perhitungan Indeks Hijau Biru Indonesia	SWP I.F Blok I.F.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Disperindag Aceh	Disperindakop & UKM Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
9	Penanaman tanaman peredam kebisingan pada buffer KPI	SWP I.A Blok I.A.3 dan SWP I.F Blok I.F.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Disperindag Aceh	Disperindakop & UKM Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
B.2.5	Perwujudan Zona Perumahan															
1	Pengembangan prasarana dan sarana perumahan kepadatan tinggi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Pengembangan prasarana dan sarana perumahan kepadatan sedang	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A,5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta,		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5 dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.	Masyarakat, Sumber Lain			Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
3	Pengembangan prasarana dan sarana perumahan kepadatan rendah	SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
4	Pengembangan permukiman kawasan agropolitan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Pengembangan prasarana permukiman kawasan eks transmigrasi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
6	Pengembangan prasarana permukiman dalam penanganan bencana	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4														
7	Sosialisai rumah sehat	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain								
8	Program pemberian bantuan peningkatan/perbaikan perumahan miskin dan hampir miskin	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain								
9	Penyediaan rumah susun sederhana sewa dan kawasan perumahan bersubsidi untuk MBR	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain								
10	Pengembangan perumahan baru secara kompak dengan konsep hunian berimbang	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
11	Pencegahan terbentuknya permukiman kumuh baru serta peremajaan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
12	Sosialisasi Peraturan perizinan bangunan atau IMB dan penertiban kawasan permukiman yang sudah ada maupun yang baru	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
13	Pembangunan kolam retensi atau resapan berupa sumur resapan dan biopori	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
14	Pengaturan ketinggian bangunan yang diperbolehkan dengan konstruksi bangunan yang aman untuk lingkungan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
15	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di Perumahan untuk menunkang fungsi hunian	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
16	Pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan dari sumber sampah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
17	Pengelolaan dan peningkatan layanan air limbah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
18	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
19	Pengaturan RTH privat dan publik	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2,	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4														
B.2.6	Perwujudan Sarana Pelayanan Umum (SPU)															
1	SPU Skala Kota;															
	Pembangunan SMA Batu XII	SWP I.A Blok I.A.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh, Bappeda Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Aceh Utara, Dinas Kesehatan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	Peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan dan kesehatan skala kota	SWP I.A Bok A.4 SWP I.E Blok I.E.3														
	Peningkatan kualitas kawasan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan skala kota															
2	SPU Skala Kecamatan;															
	Pembangunan SMP Ulee Gampong	SWP I.A Blok I.A.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh, Bappeda Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Aceh Utara, Dinas Kesehatan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	Pembangunan Puskesmas Pembantu Alue Seumambu	SWP I.B Blok I.B.4														
	Peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan dan kesehatan skala kecamatan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; SWP I.E Blok I.E.3; dan SWP I.F Blok I.F.2.														
	Peningkatan kualitas kawasan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan skala kecamatan															
	Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan skala kecamatan															
3	SPU Skala Kelurahan;															
	Pembangunan SD Lhok Meurbo	SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh, Bappeda Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Aceh Utara, Dinas Kesehatan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
	Pembangunan puskemas Buket Hagu	SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6														
	Peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan dan kesehatan skala kelurahan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;														
	Peningkatan kualitas kawasan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan skala kelurahan	SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1;														
	Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan skala kelurahan	SWP I.D Blok I.D.1; SWP I.E Blok I.E.3; dan SWP I.F Blok I.F.4.														
4	SPU Skala RW;															
	Pembangunan fasilitas kesehatan Alue Leuhob	SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh, Bappeda Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan dan kesehatan skala RW	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Aceh Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Aceh Utara, Dinas Kesehatan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
	Peningkatan kualitas kawasan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan skala RW															
	Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan skala RW															
5	Perencanaan penyediaan PSU Perumahan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain		Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh, Bappeda Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Aceh Utara, Dinas Kesehatan Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
B.2.7	Perwujudan Ruang Terbuka Non Hijau															
1	Pengembangan dan Pemeliharaan sarana ruang terbuka non hijau	SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Penyediaan fasilitas dasar dan elemen pelengkap untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna RTNH	SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
B.2.8	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa															
A	Perwujudan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota															
1	Pengembangan Pasar Komoditas Perkebunan dan Pertanian	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	penyediaan Ruang Parkir untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.A.5 SWP I.B Blok I.B.1	Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain			Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara, Satpol PP										
4	Pengaturan sirkulasi lalu lintas di sekitar kawasan perdagangan dan jasa	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara, Satpol PP	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Penataan kawasan pasar tradisional relokasi pedagangan kaki lima	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara, Satpol PP	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
6	Pengembangan potensi RTH minimal Sebesar 30% dari keseluruhan luas sub-zona perdagangan dan jasa	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
7	Pengelolaan persampahan menurut kategori sampah 3R	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
8	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
9	Optimalisasi lahan sebagai RTH	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
B	Perwujudan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP															
1	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.D Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 -	2035 -	2040 -
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2044
2	penyediaan Ruang Parkir untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.D Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara, Satpol PP	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Pengaturan sirkulasi lalu lintas di sekitar kawasan perdagangan dan jasa	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.D Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara, Satpol PP	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
4	Pengembangan potensi RTH minimal Sebesar 30% dari keseluruhan luas sub-zona perdagangan dan jasa	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.D Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Pengelolaan persampahan menurut kategori sampah 3R	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.D Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
6	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.D Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
7	Optimalisasi lahan sebagai RTH	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.D Blok I.D.4; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 -	2035 -	2040 -
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2044
		SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.														
C	Perwujudan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
1	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP I.D Blok I.D.1.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	penyediaan Ruang Parkir untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP I.D Blok I.D.1.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara, Satpol PP	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Pengaturan sirkulasi lalu lintas di sekitar kawasan perdagangan dan jasa	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP I.D Blok I.D.1.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara, Satpol PP	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
4	Pengembangan potensi RTH minimal Sebesar 30% dari keseluruhan luas sub-zona perdagangan dan jasa	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP I.D Blok I.D.1.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Pengelolaan persampahan menurut kategori sampah 3R	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP I.D Blok I.D.1.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
6	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP I.D Blok I.D.1.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
7	Optimalisasi lahan sebagai RTH	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP I.D Blok I.D.1.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
B.2.9	Perwujudan Zona Perkantoran															
1	Pengembangan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan rutin dan berkala gedung dan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta,	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	bangunan kantor pemerintah sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1; SWP I.E Blok I.E.3; dan SWP I.F Blok I.F.2.	Masyarakat, Sumber Lain			Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara										
2	Penambahan dan Penataan lahan parkir	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1; SWP I.E Blok I.E.3; dan SWP I.F Blok I.F.2.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Pengembangan potensi RTH minimal 25% dari keseluruhan luas zona perkantoran (KT)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1; SWP I.E Blok I.E.3; dan SWP I.F Blok I.F.2.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
4	Optimalisasi lahan sebagai RTH	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1; SWP I.E Blok I.E.3; dan SWP I.F Blok I.F.2.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
5	Pengembangan jalur evakuasi dan tanggap bencana di gedung perkantoran	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1; SWP I.E Blok I.E.3; dan SWP I.F Blok I.F.2.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
6	Perlindungan serapan air tanah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1; SWP I.E Blok I.E.3; dan SWP I.F Blok I.F.2.	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Dinas PUPR Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
B.2.10	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana				Tahun Pelaksanaan								
				Kementerian /Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi Aceh yg Membidangi	Perangkat Daerah Aceh Utara yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lain	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
								1	1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Pengembangan Kawasan Pengelolaan Persampahan	SWP I.C Blok I.C.3	APBN, APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Aceh	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Pengembangan potensi RTH minimal 30% dari keseluruhan luas zona pengelolaan persampahan (PP)	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Provinsi Aceh, APBD Kabupaten Aceh Utara, Aceh		Dinas PUPR Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
B.2.1 1	Perwujudan Zona Transportasi															
1	Penyusunan kajian atau studi kelayakan Terminal Tipe C	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	-	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
2	Penyediaan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum) untuk zona transportasi	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	-	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
3	Pengembangan potensi RTH minimal 20% dari keseluruhan luas zona transportasi (TR)	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten Aceh Utara, Swasta, Masyarakat, Sumber Lain	-	-	Dinas PUPR Aceh Utara, Dinas Perhubungan Aceh Utara	Swasta, Masyarakat, Sumber Lain									
B.2.1 2	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan															
1	Pengembangan dan optimalisasi kawasan pertahanan dan keamanan Koramil 20/Cgk.	SWP I.A Blok I.A.5	APBN	Kementerian Pertahanan												
2	Mengalokasikan batasan fisik berupa RTH bagi penggunaan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	SWP I.A Blok I.A.5	APBN	Kementerian Pertahanan												

PJ. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Intensitas Pemanfaatan Ruang				
				KDB Maksimum	KLB Maksimum	Koefisian Dasar Hijau Minimum	KTB Maksimum	Luas Kaveling Minimal (m2)
ZONA LINDUNG								
Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	0%	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	10%	0.1	80%	0%	
		Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0.1	80%	0%	-
		Taman RW	RTH-5	10%	0.1	80%	0%	-
		Pemakaman	RTH-7	20%	0.2	80%	0%	-
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	0%	-
ZONA BUDI DAYA								
Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	0%	0	0%	0%	-
Zona Perkebunan Rakyat	KR	Perkebunan Rakyat	KR	40%	1.2	60%	0%	
Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	5%	0.05	0%	0%	-
		Perkebunan	P-3	5%	0.05	0%	0%	-
Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	55%	2.2	25%	30%	-
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	65%	2.6	20%	30%	80
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%	2.4	25%	30%	100
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	1.8	30%	30%	120
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	3	25%	100%	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	2.4	30%	100%	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	1.8	30%	50%	-
		SPU Skala RW	SPU-4	60%	1.2	35%	30%	-
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	60%	2.4	25%	30%	-
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	80%	3.2	5%	0%	-
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	80%	3.2	5%	0%	-
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	80%	2.4	5%	0%	-
Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	60%	2.4	25%	90%	-
Zona Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	40%	1.6	30%	30%	-
Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR	40%	1.6	20%	50%	-
Zona Pertahanan Keamanan	HK	Pertahanan Keamanan	HK	60%	1.8	30%	30%	-

PJ. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA

KETENTUAN TATA MASSA BANGUNAN

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jumlah Lantai Maksimal	Ketinggian Bangunan Maksimal	Garis Sempadan Bangunan						Jarak Bebas Antar Bangunan	
						Jalan Kolektor Primer	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Lokal Primer	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Lingkungan Sekunder	Jarak Bebas Samping Minimum	Jarak Bebas Belakang Minimum
ZONA LINDUNG													
Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	1	4								
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	1	4	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5	4 meter	4 meter
		Taman Kecamatan	RTH-3	1	4	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5	4 meter	4 meter
		Taman Kelurahan	RTH-4	1	4	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5	4 meter	4 meter
		Taman RW	RTH-5	1	4	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5	4 meter	4 meter
		Pemakaman	RTH-7	1	4	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5	4 meter	4 meter
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-								
ZONA BUDI DAYA													
Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-								
Zona Perkebunan Rakyat	KR	Perkebunan Rakyat	KR	3	12	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5	3 meter	3 meter
Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	1	4	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5	3 meter	3 meter
Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	4	16	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5	Jarak bebas samping bangunan sepanjang 1 meter, berlaku untuk kualifikasi sebagai berikut: a. Kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya; b. Kaveling dengan lebar 10 - 20 meter diisyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya; dan c. Kaveling dengan lebar minimum 20 meter diisyaratkan berjarak pada kedua sisinya.	Jarak bebas belakang bangunan berlaku untuk kualifikasi sebagai berikut: a. Kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan berjarak 1 meter; b. Kaveling dengan lebar 10 - 20 meter diizinkan berjarak 2 meter; dan c. Kaveling dengan lebar minimum 20 meter dizinkan berjarak 3 meter.
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	4	16	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	4	16	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	3	12	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	5	20	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	4	16	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	3	12	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
		SPU Skala RW	SPU-4	2	8	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	4	16	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jumlah Lantai Maksimal	Ketinggian Bangunan Maksimal	Garis Sempadan Bangunan						Jarak Bebas Antar Bangunan	
						Jalan Kolektor Primer	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Lokal Primer	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Lingkungan Sekunder	Jarak Bebas Samping Minimum	Jarak Bebas Belakang Minimum
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	4	16	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	4	16	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	3	12	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	4	16	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
Zona Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	4	16	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR	4	16	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		
Zona Pertahanan Keamanan	HK	Pertahanan Keamanan	HK	3	12	7.5	7.5	5.5	5.5	3.5	3.5		

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR